

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAJIB PUNGUT
(WAPU) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
(PPnBM)**

(Studi Pada PT Petrokimia Gresik)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**WIDYANTI ANDARUNI
NIM. 125030405111011**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

*Kupersembahkan karyaku
Kepada Ayah, Mama, Adik Kiki,
Mas Ibad, Ananda, Bunga Nura, Delia, Kirana,
Nita, Rizka, dan seluruh sahabat-sahabatku tersayang*

MOTTO

BERUSAHA DISERTAI DENGAN DOA
TERUTAMA DOA DARI ORANG-ORANG YANG
MENYAYANGI KITA
SERTA RIDHO DARI ALLAH
ADALAH KUNCI UTAMA KESUKSESAN

Unknown

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Implementasi Wajib Pungut (WAPU) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM) (Studi pada PT Petrokimia Gresik)

Disusun oleh : Widyanti Andaruni

NIM : 125030405111011

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, Juni 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si

NIP. 19600515 198601 1 002

Sri Sulasmiyati S.Sos, MAP

NIP. 19770420 200502 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juni 2016
Jam : 13.00 WIB
Skripsi atas nama : Widyanti Andaruni
NIM : 125030405111011
Judul : Analisis Implementasi Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Studi Pada PT Petrokimia Gresik)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Kadarisman Hidayat M.Si

NIP. 19600515 198601 1 002

Sri Sulasmiyati S.Sos, MAP

NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota

Anggota

Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA

NIP. 19580501 198403 1 001

Drs. Mochammad Djudi M, M.Si

NIP. 19520607 198010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, April 2016

Yang Membuat Pernyataan

Widyanti Andaruni
NIM. 125030405111011

RINGKASAN

Widyanti Andaruni, 2016, Analisis Implementasi Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Studi Pada PT Petrokimia Gresik), Dr. Kadarisman Hidayat M,Si, Sri Sulasmiyati S.Sos, MAP, 94 Hal + xiv.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Salah satu penerimaan pajak terbesar yaitu berasal dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, serta orang pribadi. Setiap pemungutan PPN dan/atau PPnBM dilakukan oleh PKP. Sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015, Menteri Keuangan menunjuk secara langsung Badan Usaha sebagai Pemungut PPN dan/atau PPnBM yang juga melalui peraturan tersebut dilakukan restrukturisasi. Badan Usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut memiliki dua status, yaitu sebagai PKP dan sebagai WAPU PPN dan/atau PPnBM.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian pada PT Petrokimia Gresik Situs penelitian dilakukan di Gedung Kantor Utama PT Petrokimia Gresik Lantai 1 (satu) Departemen Keuangan, Bagian Pajak dan Asuransi (PARANSI). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat apa saja perbedaan yang terjadi saat PT Petrokimia Gresik masih berstatus sebagai PKP serta saat PT Petrokimia Gresik telah ditetapkan sebagai WAPU. Selain itu juga dapat diketahui bahwa PT Petrokimia Gresik melakukan kewajiban perpajakannya setelah ditunjuk sebagai WAPU telah sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Serta hambatan-hambatan yang terjadi saat awal penunjukan PT Petrokimia Gresik sebagai WAPU PPN dan/atau PPnBM dan cara-cara PT Petrokimia Gresik mengatasinya.

Kata Kunci: Wajib Pungut, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Badan Usaha Milik Negara.

SUMMARY

Widyanti Andaruni, 2016, Implementation Analysis Wajib Pungut (WAPU) of Value Added Tax (PPN) and Tax in Selling Luxurious Goods (PPnBM) (Study at PT Petrokimia Gresik), Dr. Kadarisnan Hidayat M.Si., Sri Sulasmiyati S.Sos, MAP, 94 page + xiv.

Tax is one of the nation revenue source. One of the largest tax came from revenue of Value Added Tax (PPN). PPN was taxed on consumption of Barang Kena Pajak (BKP) and Jasa Kena Pajak (JKP), while tax in selling luxurious goods (PPnBM) is taxed for Barang Kena Pajak (BKP) categorized in luxurious goods, done by government, companies and personal. Every PPN and/or PPnBM collection is done by PKP. Since 2015, through Peraturan Menteri Keuangan Number 37/PMK.03/2015, Finance Minister directly appointed BUMN as Collector of PPN and/or PPnBM whereas through the same regulation, restructuring is implemented. BUMN as Collector has two status, that is as PKP and as WAPU PPN and/or PPnBM.

Type of study in this paper is descriptive study with qualitative approach. Author conduct study in PT Petrokimia Gresik. Study site is Main Office Building of PT Petrokimia Gresik 1st floor in Finance Department, Tax Division and Insurance (PARANSI). Data for this study was obtain through interview and documentation.

Based on the study results, it can be seen the difference occur when PT Petrokimia Gresik carrying the status as PKP and when it has been appointed as WAPU. Moreover, it is also known that PT Petrokimia Gresik in conduct its taxation obligation after appointed as WAPU has already in accord with PMK Number 37/PMK.03/2015. Obstacles occur when PT Petrokimia Gresik was appointed as WAPU PPN and/or PPnBM and this paper describe how PT Petrokimia Gresik deals with this.

Keywords: *Wajib Pungut (WAPU), value added tax, tax on selling luxurious goods, state owned enterprise.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga skripsi berjudul **“Analisis Implementasi Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Studi Pada PT Petrokimia Gresik)”** dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Banyak pihak yang juga telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, peneliti menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang tua peneliti, Yadi dan Atik Durotulyatimah yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehubungan dengan itu peneliti juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya serta selaku ketua komisi pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Ibu Sri Sulasmiyati S.Sos, MAP selaku anggota dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Akhas Aji Panunggal selaku pembimbing penelitian pada PT Petrokimia Gresik, yang tak pernah lelah dan selalu memberikan segala informasi yang peneliti butuhkan.
6. Seluruh karyawan PT Petrokimia Gresik yang telah bersedia membantu serta meluangkan waktu kepada peneliti untuk kelancaran peneliti menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat seperjuangan Nanda, Delia, Kirana, Nita, Rizka yang selalu memberikan semangat dari awal perkuliahan sampai tak terbatas waktu.
8. Sahabat Kos SST 12 Bunga Nura, Ingga, Rizka, Keke yang selalu memberikan warna lain selain perkuliahan, serta menjadi orang-orang pertama yang selalu ada.
9. Sahabat Kontrakan Betha, Tayu, Devi yang selalu membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
10. Seluruh teman-teman UKM TEGAZS terima kasih atas pengalaman yang tidak peneliti dapatkan di bangku perkuliahan.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan semua, terima kasih terhadap seluruh bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat balasan baik dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan secara materi maupun penyajiannya sehingga masih jauh dari kata sempurna, tetapi peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, April 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Tinjauan Teoritis dan Konsep.....	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Pemungutan Pajak	12
4. Jenis Pajak	14
5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	15
B. Pemungut	28
C. Dasar Hukum Pemungut Pajak	29
D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Wajib Pungut	30
E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015	33
F. Kerangka Pemikiran	36
 BAB III METODE PENELITIAN	 38
A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian	42
G. Analisis Data.....	43
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Perusahaan PT Petrokimia Gresik	45
2. Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan	48

3. Makna Logo Perusahaan.....	49
4. Struktur Organisasi	50
5. Anak Perusahaan PT Petrokimia Gresik.....	56
6. Perusahaan Patungan (<i>Joint Ventures</i>)	56
7. Yayasan.....	56
B. Penyajian Data	57
1. Mekanisme Pemungutan PPN dan PPnBM sebelum dan sesudah PT Petrokimia Gresik Ditunjuk Sebagai Wajib Pungut	57
2. Kewajiban Perpajakan Terkait dengan Kepatuhan dalam Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPnBM Setelah Ditunjuk Sebagai Pemungut	63
3. Hambatan-hambatan yang Muncul Terkait Penunjukan PT Petrokimia Gresik Sebagai Wajib Pungut PPN dan PPnBM serta Cara Menanganinya.....	69
C. Pembahasan	71
1. Implementasi Pemungutan PPN dan PPnBM PT Petrokimia Gresik Yang Ditunjuk Sebagai Wajib Pungut	71
2. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Berkaitan Dengan Kepatuhan Pelaporan dan Penyetoran PPN Sesudah Menjadi Wajib Pungut	78
3. Hambatan-Hambatan yang Terjadi Saat Penunjukan Menjadi WAPU serta Cara Mengatasinya.....	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2011-2014	1
2	Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2011-2014.....	3
3	SPT Masa PPN Formulir 1111 Tahun 2014	63
4	SPT Masa PPN Formulir 1111 Tahun 2015	66
5	Penyerahan BKP dan/atau JKP.....	75
6	Perbedaan PKP dengan Wajib Pungut.....	76
7	Masa Transisi dari PKP menjadi Wajib Pungut	77
8	Pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1111 2015	81
9	Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT Tahun 2015	83
10	Ringkasan Implementasi Wajib Pungut PPN dan PPnBM (pada PT Petrokimia Gresik)	89

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Kerangka Pemikiran	37
2	Model Miles dan Huberman	43
3	Logo PT Petrokimia Gresik	49
4	Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik	55

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

- 1 Pedoman Wawancara
- 2 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
No : PEM-00054/WPJ.07/KP.0103/2014
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:37/PMK.03/2015
Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
- 4 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah Oleh Badan Usaha Tertentu dan Format Daftar Nominatif
Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak
- 5 Surat Keterangan Menyelesaikan Kegiatan Penelitian
- 6 Alur Pemungutan PPN saat PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai PKP
- 7 Alur Pemungutan PPN saat PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai
WAPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran wajib dari seluruh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan untuk membiayai pengeluaran negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penerimaan dalam negeri ada dua yakni penerimaan dari perpajakan dan penerimaan dari bukan pajak, yakni penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor migas dan non migas. Menurut Resmi (2011:5) Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dari penerimaan negara non migas. Kenyataannya penerimaan negara dari sektor migas tidak dapat diandalkan lagi, karena penerimaan dari sektor migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, disamping itu jumlah target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya semakin meningkat.

Tabel 1 Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2011-2014 (dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Jumlah Target		Presentase target Pajak pada target APBN (%)
		APBN	Pajak	
1.	2011	1.210.599,6	873.874,0	72
2.	2012	1.358.205,0	1.016.237,3	75
3.	2013	1.529.673,1	1.192.994,1	78
4.	2014	1.635.400	1.246.100	76

Sumber : *Departemen Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015*

Tabel 1 menjelaskan jumlah target penerimaan APBN setiap tahunnya semakin meningkat, hal itu juga mengakibatkan target penerimaan pajak meningkat. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013, presentase target pajak pada target APBN mengalami peningkatan, berdeda dengan tahun 2013 hingga 2014 presentase target pajak mengalami penurunan, akan tetapi presentase target pajak pada target APBN dari tahun 2011 hingga tahun 2014, tetap diangka 70% lebih.. Dapat diartikan pajak sangat berkontribusi terhadap target penerimaan APBN selama 4 (empat) tahun berturut-turut.

Pajak memiliki kontribusi yang cukup penting dalam penerimaan negara, pajak di Indonesia dibedakan dalam sistem pemungutannya yaitu *official assessment system*, *withholding system*, *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini adalah *self assessment system*. Menurut Markus (2005:375) *Self Assessment System/Self Taxing System* adalah suatu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat Wajib Pajak (Penanggung Beban Pajak) secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya hutang pajaknya, menyetorkannya ke kas negara, dan mempertanggungjawabkan perhitungan, penerapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut dengan istilah fiskus. Menurut Lubis dan Toruan (2010:10) Reformasi pajak yang dimulai pada tahun 1983 menerapkan sistem administrasi perpajakan dengan sistem *self assessment* dimana sistem tersebut dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang vital.

Pajak tidak hanya dibedakan melalui sistem pemutannya, tetapi juga dibedakan melalui jenis pajaknya, Indonesia memiliki 2 jenis pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengelola seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah yang mengelola seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB), dan lain sebagainya. Setiap jenis pajak memiliki target penerimaan yang berbeda-beda, sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2011-2014 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Penerimaan Perpajakan	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak Dalam Negeri	819.752	930.862	1.099.944	1.256.304
PPh	431.122	465.070	538.760	591.621
PPN	277.800	337.584	423.708	518.879
PBB	29.893	28.969	27.344	25.541.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-1	0	0	0
Cukai	77.010	95.028	104.730	114.284
Pajak Lainnya	3.928	4.211	5.402	5.980
Pajak perdagangan internasional	54.122	49.656	48.421	53.915
Bea Masuk	25.266	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	28.856	21.238	17.609	19.978

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 2 menjelaskan penerimaan pajak dalam negeri yang terbesar setelah Pajak Penghasilan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan pendapatan yang cukup cepat dibandingkan dengan Pajak Penghasilan. PPN merupakan pajak pusat dimana pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat yaitu DJP. Menurut Muljono (2008:1) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax* merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambah yang dimaksud yaitu setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjualan menghendaki tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan.

PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) serta Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, serta orang pribadi. Konsumen BKP serta JKP salah satunya adalah Badan Usaha. Badan usaha umumnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Salah satu bentuk badan usaha yang diatur oleh negara melalui undang-undang yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, apabila kepemilikan saham atas Badan Usaha oleh pemerintah sebesar 51% maka badan usaha tersebut menjadi Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) serta menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Badan usaha yang menjadi BUMN akan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan secara perpajakan. Selain sebagai PKP, BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan akan menjadi Wajib Pungut (WAPU) PPN dan PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan badan usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya, bahwa dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha tertentu, perlu menunjuk Badan Usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut secara otomatis menambah kewajiban perpajakan yang di tanggung oleh BUMN akan semakin bertambah.

Salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut oleh Menteri Keuangan ialah PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang produksi pupuk, bahan-bahan kimia seperti H_2SO_4 , H_2PO_4 , CO_2 , *cement retarder*, dan *aluminium fluoride* dan

saja jasa lainnya seperti konstruksi dan pembuatan boiler. Jenis pupuk yang di produksi oleh PT Petrokimia Gresik diantaranya *urea* dan ZA, SP-36 dan ZK, *phonska* dan NPK, PUPUK *Spesifikasi komoditi*, petrokanik, petro *biofertil*, KCL dan *rock phosphate*. Pada bulan Maret PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Wajib Pungut, secara otomatis kewajiban perpajakan yang ditanggung juga semakin kompleks, di antaranya kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final, Pasal 4 ayat 2, PPN, serta PPN Wajib Pungut.

PT Petrokimia Gresik akan memiliki kewajiban perpajakan serta tanggungjawab yang lebih dibandingkan dengan Badan Usaha atau BUMN yang tidak ditunjuk sebagai Wajib Pungut oleh Menteri Keuangan. PT Petrokimia Gresik wajib memungut, melaporkan menyetorkan setiap PPN dan PPnBM yang terhutang atas penyerahan BKP dan JKP oleh rekanan. Setiap BUMN yang ditunjuk Menteri Keuangan merupakan PKP, serta kewajiban dan tanggungjawab perpajakannya bertambah sebagai Wajib Pungut PPN dan PPnBM karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Implementasi Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Studi Pada PT Petrokimia Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) pada PT Petrokimia Gresik yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU) ?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan sesudah PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU) ?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul terkait penunjukan PT Petrokimia Gresik sebagai Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebelum dan sesudah PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU);
2. Mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan sesudah PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU);
3. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul terkait penunjukan PT Petrokimia Gresik sebagai Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

- a. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat digunakan menjadi tambahan informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang sama.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru bagi peneliti khususnya mengenai PPN yang dipungut oleh BUMN.

2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT Petrokimia Gresik dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penunjukan Badan Usaha dalam pemungutan PPN.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Didalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang dapat memberikan gambaran awal kepada pembaca guna mempermudah dalam memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Didalam bab ini berisikan tentang penguraian mengenai teori-teori serta konsep yang diambil dari bacaan-bacaan yang dianggap relevan. Peneliti akan menguraikan teori-teori maupun konsep yang terkait dengan

Implementasi Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Studi Pada PT Petrokimia Gresik) yang didapat dari berbagai literatur akademik maupun dari perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Didalam bab ini menjelaskan bagaimana metode penelitian serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, antara lain dengan menentukan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Didalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mencantumkan gambaran umum tempat penelitian, penyajian data, serta pembahasan dari rumusan masalah.

BAB V : Penutup

Didalam bab ini berisikan simpulan dari keseluruhan isi secara garis besar, serta saran peneliti bagi perusahaan tempat peneliti melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis dan Konsep

1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimanan Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, diantaranya :

- a. Menurut Sumitro dalam Resmi (2011:0) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2011:0) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- c. Menurut Feldmann dalam resmi (2011:0) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa

- d. (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- e. Menurut Andriani dalam Sukardji (2005:1) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli, pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pajak sifatnya bisa dipaksakan kepada seluruh rakyat dalam suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan negara.

Unsur-unsur pokok dalam pajak, menurut Mardiasmo (2013:1) yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12-13) fungsi pajak pada dasarnya adalah :

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Menurut Sumarsan (2013:5) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan sktruktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi penerimaan serta fungsi mengatur.

Fungsi penerimaan digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi mengatur digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi negara.

3. Pemungutan Pajak

a. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2011:5) pelaksanaan pemungutan pajak didasari beberapa teori, di antaranya :

1) Teori Asuransi

Pembayaran premi asuransi ini bertujuan sebagai perlindungan bagi setiap orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya.

2) Teori Kepentingan

Pembedaan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang diselenggarakan pemerintah.

3) Teori Daya Pikul

Biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan pemerintah kepada setiap orang harus dipikul oleh masing-masing yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan tetap berpegang pada asas keadilan, setiap orang yang dikenakan pajak, tergantung pada daya pikul masing-masing orang dalam artian bahwa

pengenaan pajak ini dikenakan sesuai besarnya penghasilan yang bersangkutan.

4) Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu dengan berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang patut dilaksanakan. Dengan demikian negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat.

5) Teori Asas Daya Beli

Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:17) sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi 3 bagian :

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) *Withholding Tax System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Pemungutan pajak didasari beberapa teori, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti serta teori asas daya beli. Sistem pemungutan dibagi menjadi 3 yaitu *official assessment system* dimana pemungutannya dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang, *self assessment system* dimana negara

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya, dan yang terakhir *withholding tax system* dimana wajib pajak mempercayakan besarnya pajak yang terutang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak).

4. Jenis Pajak

Menurut Ilyas (2007:19) jenis/pengelompokan pajak di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
- 2) Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

- 1) Pajak Pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di Indonesia jenis pajak di golongan menjadi 3 , yaitu menurut sifat, sasaran, serta lembaga pemungutnya. Menurut sifatnya pajak digolongkan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung, pajak langsung di bebaskan oleh wajib pajak sendiri, pajak tidak langsung dapat dibebaskan kepada orang lain. Menurut sasarannya pajak digolongkan menjadi 2 yaitu subjek dan objek pajak, subjek pajak adalah wajib pajak itu sendiri sedangkan objek pajak adalah perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak di golongan menjadi 2 yaitu pajak pusat yang di kelola oleh negara, dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing.

5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Halim, dkk (2014:251) Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di

daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di daerah pabean yang dikenakan satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Rosdiana dan Irianto (2012:222) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Sedangkan menurut Rusjdi (2005:1) PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Sementara menurut Siti dan Ely (2010:230) Pajak Pertambahan Nilai ada akibat adanya faktor-faktor produksi yang digunakan sampai barang tersebut sampai ditangan konsumen akhir.

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Penjualan yang dikenakan atas penambahan nilai ekonomis yang terjadi karen proses produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai dibebankan

pada konsumen akhir yang mengambil manfaat dari barang atau jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan dipungut di awal jalur produksi maupun distribusi barang atau jasa kena pajak.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Menurut Resmi (2012:2) karakteristik yang dimiliki Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- 1) Pajak Tidak Langsung
Secara yuridis, pemikul pajak, tidak membayarkan secara langsung beban pajaknya ke kas Negara.
Secara ekonomis, beban pajak di tanggung oleh penikmat, atau konsumen.
- 2) Pajak Objektif
Kewajiban perpajakan timbul dan dihitung berdasarkan objek (barang), bukan subjek (orang)
- 3) *Multi Stage Tax*
Yaitu pengenaan pajak yang terjadi setiap kali ada proses baru, penambahan nilai pada suatu barang.
- 4) PPN Terutang untuk dibayar ke kas Negara menggunakan *Indirect Substraction Method/ Credit Method/ Invoice Method*.
 - a) Pajak yang akan dibayarkan harus dihitung dulu dengan cara mengurangi jumlah pajak yang masuk (dari pembelian bahan baku, dsb) dengan pajak keluaran (dikonsumsi oleh konsumen) baru kemudian disetor ke kas negara.
 - b) Perhitungan dengan cara mengurangi pajak dengan pajak yang lainnya dengan begitu akan diperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara.
 - c) Jumlah pajak yang dibayarkan harus dibuktikan dengan adanya Faktur Pajak.
- 5) Pajak Konsumsi Dalam Negeri
Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN.
- 6) Bersifat Netral
 - a) PPN dikenakan atas konsumsi (barang dan jasa) bukan pada pendapatan perseorangan.
 - b) Dipungut berdasarkan pada tempat tujuan.

- 7) PPN hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat adanya penambahan nilai atas barang, sehingga tidak menimbulkan pajak berganda.

Menurut sifatnya PPN dan PPnBM merupakan pajak tidak langsung dimana wajib pajaknya tidak secara langsung membayarkan beban pajaknya. Selain itu PPN dan PPnBM merupakan pajak objektif serta bersifat netral, maksudnya PPN atau PPnBM dikenakan atas barang yang dikonsumsi oleh wajib pajak atau barang yang tergolong mewah serta dikenakan atas konsumsi bukan pendapatan wajib pajak dan dipungut berdasarkan tempat dan tujuan. PPN maupun PPnBM dipungut hanya satu kali, yaitu pada saat adanya penambahan nilai atas barang, agar tidak terjadi pemungutan pajak berganda.

c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah

Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai, adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Sepuluh Persen) Berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (Nol Persen) pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak yang diekspor atau konsumsi diluar Daerah Pabean.
- 3) Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (Lima Persen) dan Paling Tinggi 15% (Lima Belas Persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai).

Sedangkan Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8, adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- 2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- 3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Kesederhanaan dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat dari Rumus Dasar Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai berikut :

$$PPN \text{ atau } PPnBM = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan www.pajak.go.id

Sebelum melakukan perhitungan, pengusaha kecil atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengetahui Dasar Pengenaan Pajaknya terlebih dahulu. Menurut Purwono (2010:282) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terhutang.

Menurut Suandy (2011:138) Dasar Pengenaan PPN terdiri dari 5 (lima), diantaranya :

1) Harga Jual

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (FP).

2) Nilai Pengganti

Yang merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (FP).

3) Nilai Impor

Yang merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut berdasarkan UU PPN 1984.

4) Nilai Ekspor

Yang merupakan nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5) Nilai Lain

Menurut Sukardji (2014:139) nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, yaitu :

- 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Pengganti setelah dikurangi laba kotor;
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Nilai Pengganti setelah dikurangi laba kotor;
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

- 5) Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar Harga Jual eceran;
- 6) Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- 7) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusan ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- 8) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- 9) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- 10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah taguhan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 menambahkan nilai lain sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- 1) Untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan adalah 20 (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian;
- 2) Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

d. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Penjualan atas Barang Mewah

Menurut Sukardji (2005:121) Subjek Pajak Pertambahan Nilai dikelompokkan menjadi :

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek pajak PPN harus PKP adalah pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f serta pasal 16 D jo pasal 1 angka 15 Undang-undang PPN 1984 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa :

- a) Yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dapat dikenakan PPN adalah PKP (Pasal 4 huruf a, huruf c jo pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).
- b) Yang mengekspor BKP yang dapat dikenakan PPN adalah PKP (Pasal 4 huruf f UU PPN 1984).
- c) Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah PKP (Pasal 16 D UU PPN 1984).
- d) Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan BKP dan/atau JKP dapat dikenakan PPN adalah PKP (Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 143 Tahun 2000).

2) Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus PKP tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam, Pasal 4 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16 Undang-undang PPN 1984. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN :

- a) Siapapun yang mengimpor BKP (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984).
- b) Siapapun yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 1984).
- c) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16 C UU PPN 1984).
- d) Pengusaha yang tergolong dalam pengusaha kecil berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP maka setelah

dikukuhkan, pengusaha kecil tersebut menjadi PKP seutuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 A ayat (2) UU PPN 1984.

Menurut Mardiasmo (2013:303) Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Syarat:

- a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud
 - c) Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean.
 - d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat :
- a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
 - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 8) Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
- 9) Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat di kreditkan.

e. Dokumen Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah

- 1) Surat Setoran Pajak

Setiap pembayaran atau transaksi yang terjadi selalu ada tanda bukti penerimaan, sebagai contoh kuitansi, nota pembayaran dan stuk pembelian. Didalam Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang mewah juga berlaku tanda bukti pembayaran, yaitu Surat Setoran Pajak atau lebih dikenal dengan SSP. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 14, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penggunaan Surat Setoran Pajak ini berkenaan dengan pembayaran kepada negara yang akan masuk dalam kas negara sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Surat Setoran Pajak sebagai tanda bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerimaan Pembayaran yang berwenang atau apabila telah di validasi. Formulir Surat Setoran Pajak biasanya dibuat dalam 4 (empat) rangkap yaitu untuk digunakan oleh:

- a) Lembar ke-1: untuk arsip wajib pajak;
- b) Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

c) Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;

d) Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tempat pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai :

- a) Kantor Pos.
- b) Bank Badan Usaha Milik Negara.
- c) Bank Badan Usaha Milik Daerah.
- d) Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2) Faktur Pajak

Menurut Resmi (2012:52) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak sebagai syarat administrasi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan

peraturan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 jenis Faktur Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Faktur Pajak

Dibagi menjadi 3 yaitu :

i. Faktur Pajak atau Faktur Penjualan

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.

ii. Faktur Pajak Khusus

Faktur pajak ini terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Toko Retail yang merupakan toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang di tunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

iii. Faktur Pajak Eks Sederhana

Faktur Pajak ini terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

b) Dokumen tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2011, diatur bahwa Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

c) Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang selama 1 (satu) bulan kalender.

3) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Suandy (2009:157) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada 3 (tiga) jenis Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

a) SPT Masa PPN 1111

SPT ini digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).

b) SPT Masa PPN 1111 DM

SPT ini digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

c) SPT Masa PPN 1107 PUT

SPT ini digunakan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

B. Pemungut

Umumnya dalam mekanisme pemungutan, pemungut PPN dan PPnBM dilakukan oleh PKP atau bukan PKP sebagaimana diatur dalam, Pasal 4 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16 Undang-undang PPN 1984, tetapi dalam Undang-undang PPN dan PPnBM memberikan mekanisme pemungutan lain dimana dalam mekanisme tersebut yang memungut PPN dan PPnBM adalah pembeli yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM. Pembeli inilah yang dapat disebut sebagai pemungut PPN dan PPnBM. Istilah pemungut PPN dan PPnBM yaitu pihak pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang ditunjuk untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009. Beberapa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003);

2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa atau Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi (yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015);
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (yang ditunjuk menjadi Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

C. Dasar Hukum Pemungut Pajak

Umumnya perusahaan-perusahaan berskala besar sebagai wajib pajak Badan yang terdaftar sebagai perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut sebelumnya menjadi PKP mempunyai mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersendiri. Selain sebagai pembayar pajak, Wajib Pajak Badan mendapat tugas lain akibat diberlakukannya *withholding system*, artinya Wajib Pajak Badan bertindak sebagai pihak ketiga sebagai pemotong Pajak. Penunjukan Wajib Pajak Badan sebagai Pemungut Pajak sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan Bendaharawan untuk Memungut dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak. Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000, dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988 tidak berlaku lagi.

Pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Badan Usaha Milik Negara tidak lagi di tunjuk sebagai WAPU PPN dan PPnBM. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 Wajib Pajak Badan mulai 1 (satu) April 2015 ditunjuk sebagai Wajib Pungut. Upayah yang diambil oleh pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi rekanan bisnis BUMN yang tidak menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dibayarkan.

D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Wajib Pungut

1. Pengertian BUMN

Menurut (Sutedi, 2012:31) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara

yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan BUMN terdiri dari dua bagian yaitu:

a. Persero

- 1) Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- 2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

b. Perum

- 1) Maksud dan tujuan pendirian Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- 2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

2. BUMN Sebagai Pemungut PPN

Sejak tahun 2012, BUMN di tunjuk sebagai pemungut PPN dan/atau PPnBM. PPN dan/atau PPnBM yang terhutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut oleh DJP wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BUMN.

Kreteria BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, yaitu:

- a. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/03./2012)

- b. BUMN yang dimaksud sebagai pemungut PPN ini adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- c. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi PPN.
- d. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha menjadi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi Pemungut PPN dan PPnBM dan melakukan kewajiban sebagai Pemungut PPN dan PPnBM.

Pada Tahun 2015 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 menetapkan bahwa BUMN yang dilakukan restrukturisasi dengan Peraturan menteri Keuangan yang sama ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Badan usaha tertentu adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya.
- b. Badan Usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Iskandar Muda.
- c. Badan usaha tertentu yang tidak dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, yaitu: PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah.

E. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015

Salah satu BUMN yang dilakukan restrukturisasi yaitu PT Petrokimia Gresik, selain statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak juga ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBM sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015. Penetapan Peraturan Menteri Nomor

37/PMK.03/2015 tersebut mengakibatkan kewajiban perpajakan PT Petrokimia Gresik semakin bertambah, khususnya dalam PPN dan PPnBM. Berikut beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015:

1. Pasal 3

- (1) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak

2. Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh badan usaha tertentu dalam hal:
 - a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
 - d. pembayaran atas rekening telepon;
 - e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
 - f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Pasal 6

- (2) Badan usaha tertentu wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Badan usaha tertentu wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 menjelaskan pula mengenai tujuan penerapan Peraturan Menteri Keuangan tersebut :

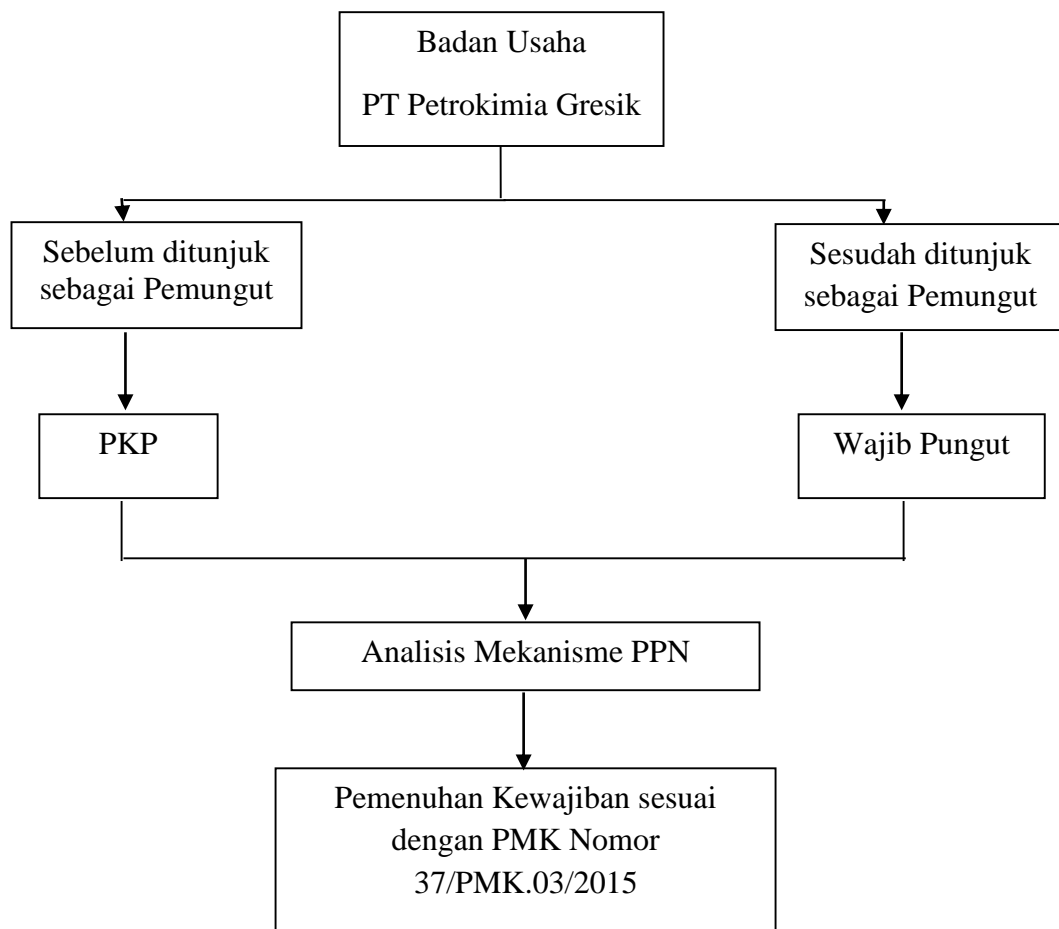
Menimbang : b. bahwa dalam rangka lebih memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha tertentu, perlu menunjuk Badan Usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

Tujuan pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 adalah untuk lebih menyederhanakan pemungutan PPN dan/atau PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan BUMN. Penerapan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 yang dilakukan oleh pemerintah atas pungutan PPN dan/atau PPnBM, mewajibkan atau membebaskan BUMN yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut untuk bertanggungjawab atas setiap

pungutan yang disetorkan ke kas negara. Secara otomatis tujuan pemerintah lebih menyederhanakan pemungutan PPN dan/atau PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan BUMN akan berdampak pada penerimaan kas negara. Secara tidak langsung pemerintah ingin aset penerimaan kas negara terlindungi melalui BUMN yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini berawal dari mekanisme PPN dan PPnBM dimana PKP yang menjadi pemungut PPN dan PPnBM. Tetapi berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tidak hanya PKP yang menjadi pemungut PPN dan PPnBM, melainkan setiap BUMN yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan. Penelitian ini menggambarkan dan mendiskripsikan bagaimana teknik pemungutan yang dilakukan BUMN sebelum ditunjuk sebagai Wajib Pungut dan sesudah ditunjuk sebagai Wajib Pungut. Bagaimana pemenuhan kewajiban BUMN yang baru saja ditunjuk sebagai Wajib Pungut dan hambatan apa saja yang dihadapi. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran
Sumber : Diolah Peneliti, tahun 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu alat bagi peneliti yang dijadikan panduan untuk melakukan kegiatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Indriantoro (2002:88) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Sujarweni (2014:6) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan praktek yang terjadi di lokasi penelitian mengenai penerapan Wajib Pungut PPN dan PPnBM oleh BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Supardi (2005:27) hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan suatu gejala/peristiwa seperti apa adanya yang nyata-nyata terjadi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:290) batasan masalah adalah sebutan untuk penelitian kuantitatif, sedangkan untuk penelitian kualitatif disebut fokus penelitian. Sedangkan menurut Moleong (2007:237) fokus penelitian adalah

suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk:

1. Membatasi studi dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang inkuriri (masukan), misalnya ketika peneliti membatasi pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh dilapangan, dengan adanya fokus penelitian maka seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan maka peneliti memilih fokus penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebelum dan sesudah PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU);
2. Pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan kepatuhan penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) PT Petrokimia Gresik setelah ditunjuk sebagai Pemungut;
3. Hambatan-hambatan yang muncul terkait penunjukan PT Petrokimia Gresik sebagai Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta cara mengatasinya.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah PT Petrokimia Gresik yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kebomas, Gresik 61119, Jawa Timur. Dikarenakan sebelumnya peneliti telah melakukan kerja praktek di PT Petrokimia Gresik, serta lokasi penelitian berdekatan dengan rumah tinggal peneliti.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian dilakukan di Gedung Kantor Utama PT Petrokimia Gresik Lantai 1 (satu) Departemen Keuangan, Bagian Pajak dan Asuransi (PARANSI). Pemilihan lokasi dan situs penelitian dikarenakan PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, selain itu PT Petrokimia Gresik telah ditetapkan sebagai Pemungut PPN dan PPnBM pada tahun 2015.

D. Sumber Data

Menurut Sujarweni (2014:73) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian ini diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Data primer berupa catatan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Wawancara yang dilakukan dengan pegawai PT Petrokimia Gresik yang secara langsung

menangani administrasi pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Selain wawancara peneliti juga melakukan pengumpulan dokumen untuk menunjang penelitian, berupa dokumen-dokumen administrasi pajak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh dari wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan alat mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka kepada subjek penelitian. Melalui teknik wawancara ini peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan terperinci mengenai mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Wajib Pungut PPN, serta mekanisme administrasi yang dilakukan pada

Departemen Keuangan, Bagian Pajak dan Asuransi (PARANSI) Seksi Pajak Pertambahan Nilai PT Petrokimia Gresik yaitu Kepala Bagian PARANSI Bapak Ahadin Mintarum seta Staff Ahli PPN Bapak Akhas Aji Panunggal. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan tujuan mendapatkan informasi lebih terbuka dari informan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, kumpulan peraturan perpajakan, internet, atau dokumen-dokumen administrasi pajak yang menunjang penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti (manusia) itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman wawancara dan pengumpulan dokumen.

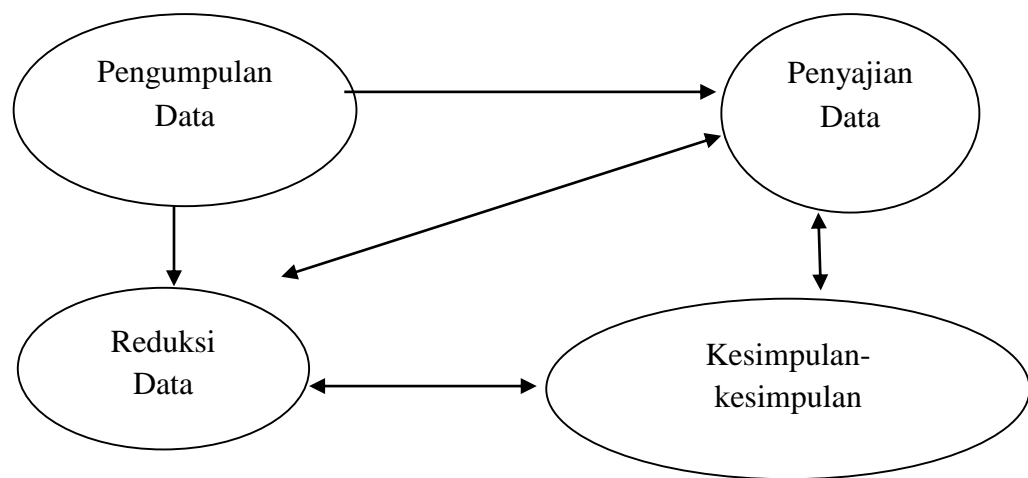
1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan informan dan mampu memahami interaksi di lapangan.
2. Pedoman wawancara merupakan instrumen kedua yang termasuk instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Secara umum, pedoman wawancara dengan menggunakan *recorder*, *camera digital*, serta alat tulis dan buku catatan.
3. Pedoman dokumentasi merupakan instrumen ketiga yang termasuk instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah dengan metode

mengumpulkan dokumen. Secara umum, pedoman dokumentasi dengan menggunakan *camera digital*, mesin *photo copy*, alat tulis dan buku catatan

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:430). Langkah-langkahnya adalah:

1. Pengumpulan Data
2. *Data Reduction* (Reduksi Data)
3. *Data Display* (Penyajian Data)
4. *Conclusion Drawing/verification* (Penyimpulan)



Gambar 2 : Model Miles dan Huberman

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan teori model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, tahun 2012

Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini:

1. Mengumpulkan dan merangkum kepustakaan atau teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan PPN dan PPnBM serta proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.03/2015. Menggambarkan atau mendeskripsikan proses pemungutan PPN dan PPnBM pada PT Petrokimia Gresik saat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Wajib Pungut PPN. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan objek penelitian dalam hal ini adalah PT Petrokimia Gresik Departemen Keuangan, Bagian Pajak dan Asuransi (Paransi) Seksi Pajak Pertambahan Nilai

2. Melakukan pengumpulan dokumen yang terlibat dalam proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Mengevaluasi atas kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan kemudian dianalisis apakah proses yang dilakukan PT Petrokimia Gresik setelah ditunjuk sebagai Wajib Pungut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.03/2015. Serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik terkait dengan ditunjuknya sebagai Wajib Pungut PPN. Saat penyajian data berlangsung juga menggunakan catatan lapangan berupa gambar (foto) maupun tabel.
3. Berdasarkan seluruh data yang telah diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, peneliti melakukan pengolahan data serta evaluasi dari keseluruhan hasil penelitian. Menyimpulkan hasil kepustakaan dengan hasil analisis pada PT Petrokimia Gresik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Perusahaan PT Petrokimia Gresik

PT Petrokimia Gresik merupakan produsen pupuk di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya (1962). Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik.

Dalam perjalannya, PT Petrokimia Gresik telah mengalami sejumlah perubahan status, diantaranya adalah sebagai Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP No. 55/1971, lalu berubah menjadi Persero berdasarkan PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975, dan sekarang sebagai anggota Holding PT Pupuk Indonesia (dahulu PT Pupuk Sriwidjaja) berdasarkan PP No. 28/1997.

PT. Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 hektar yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012 ini, PT. Petrokimia Gresik dipercaya oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 5,4 juta ton, atau meningkat 1,6 juta ton dibandingkan tahun 2011. Hal ini menjadikan PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk yang memasok 50% kebutuhan pupuk subsidi nasional.

Setelah berdirinya PT. Pupuk Sriwidjaja yang berlokasi di Palembang pada tahun 1959, pemerintah juga memikirkan untuk membangun pabrik pupuk lainnya.

Cikal bakal PT Petrokimia Gresik berasal sejak 1956 melalui Biro Perancang Negara (BPN). Pada mulanya, pabrik pupuk yang hendak dibangun di Jawa Timur ini disebut 'Projek Petrokimia Surabaya'. Nama Petrokimia sendiri berasal dari 'Petroleum Chemical' yang disingkat menjadi Petrochemical, yaitu bahan-bahan kimia yang dibuat dari minyak bumi dan gas.

Projek Petrokimia Surabaya dibentuk berdasarkan Ketetapan MPRS No. II Tahun 1960 yang dicantumkan sebagai Proyek Prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969) dan diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1960. Pembangunan proyeknya atas dasar instruksi Presiden No.1/Instr/1963 dan dinyatakan sebagai Proyek Vital sesuai dengan Surat Keputusan Presiden no. 225 Tahun 1963.

Dipilihnya daerah Gresik sebagai lokasi pabrik pupuk merupakan hasil studi kelayakan pada tahun 1962 oleh Badan Persiapan Proyek-Proyek Industri (BP3I) yang dikoordinir Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Pada saat itu, Gresik dinilai ideal dengan pertimbangan, antara lain:

- a. Cukup tersedianya lahan kosong seluas 450 hektare

- b. Cukup dekat tersedianya sumber air dari aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo
- c. Berdekatan dengan daerah konsumen pupuk terbesar, yaitu perkebunan dan petani tebu
- d. Dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan untuk mengangkut peralatan pabrik selama masa konstruksi, pengadaan bahan baku, maupun pendistribusian hasil produksi melalui angkutan laut.
- e. Dekat dengan Surabaya yang memiliki kelengkapan memadai, antara lain, tersedianya sumber daya manusia.

PT Petrokimia Gresik memiliki dua kategori produk, yaitu pupuk dan non-pupuk. Untuk pupuk subsidi PT Petrokimia Gresik memproduksi pupuk Urea, NPK (Phonska), Petroganik (pupuk organik), SP-36, dan ZA. Sedangkan untuk non-subsidi PT Petrokimia Gresik memproduksi pupuk NPK Kebomas, ZK, DAP, KCL, Rock Phosphate, Petronik, Petro Kalimas, Petro Biofertil, dan Kapur Pertanian.

Untuk kategori non-pupuk, PT Petrokimia Gresik memproduksi benih padi unggul dengan nama Petroseed dan Petro Hibrid, serta dekomposer bernama Petro Gladiator. Tak hanya itu, PT Petrokimia Gresik juga memiliki produk probiotik bernama Petrofish untuk meningkatkan produktivitas hasil tambak ikan, udang. Petro Chick untuk unggas (ayam dan bebek), dan Fit Rice, yaitu beras dengan indeks glikemik rendah.

PT Petrokimia Gresik juga menghasilkan produk-produk kimia untuk keperluan berbagai industri. Diantaranya adalah Amoniak, Asam Sulfat,

Asam Fosfat, Cement Retarder, Aluminium Flourida, CO2 cair, Dry Ice, Asam Chlorida, Oksigen, Nitrogen, Hidrogen, dan Gypsum.

2. Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen.

Misi Perusahaan

- a. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- b. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
- c. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development.

Nilai Perusahaan

- a. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- b. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
- c. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis
- d. Mengutamakan integritas di atas segala hal.
- e. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.

Budaya Perusahaan

- a. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan
- b. Hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- c. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
- d. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis
- e. Mengutamakan integritas di atas segala hal.

3. Makna Logo Perusahaan



Gambar 3 : Logo PT. Petrokimia Gresik

Sumber : www.petrokimia-gresik.com

Makna dari logo PT Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut:

Seekor kerbau berwarna kuning emas dan daun berwarna hijau berujung lima dengan huruf PG berwarna putih yang terletak di tengah-tengahnya.

Masing-masing lambang tersebut mengandung arti sebagai berikut :

a. Kerbau berwarna kuning emas

Dalam bahasa daerah (Jawa) adalah Kebomas, sebagai penghargaan kepada daerah di mana PT Petrokimia Gresik berdomisili, yaitu di wilayah kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. PT Petrokimia Gresik saat ini mempunyai areal seluas 450 hektar yang terletak di kecamatan Gresik, Manyar dan Kebomas.

1) Warna emas sebagai lambang keagungan.

2) Kerbau merupakan sahabat petani, yang dipergunakan oleh petani untuk mengolah sawah.

b. Kelopak daun hijau berujung lima

1) Daun berujung lima melambangkan kelima sila dari Pancasila.

2) Warna hijau sebagai lambang kesuburan dan kesejahteraan.

c. Huruf PG berwarna putih

- 1) PG singkatan dari Petrokimia Gresik.
- 2) Warna putih sebagai lambang bersih dan suci.
- d. Warna hitam peserta magangan nama perusahaan
 - 1) Warna hitam sebagai lambang kedalaman, stabilitas, dan keyakinan teguh.
 - 2) Garis batas hitam di seluruh komponen sebagai lambang kewibawaan dan elegan.

4. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan suatu tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, dipimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan pokok dari organisasi adalah mengkoordinir segala aktivitas yang ada dalam perusahaan, untuk itu perlu adanya struktur organisasi yang baik, sehingga dapat menunjang peaksanaan tujuan organisasi itu sendiri. Partisipasi dalam organisasi menekankan pada pembagian wewenang atau tugas-tugas dalam melaksanakan kegiatannya dengan maksud meningkatkan efektif tugas yang diberikan secara terstruktur dan lebih jelas. Struktur organisasi terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Bentuk Garis (*Line*)
 Dalam bentuk organisasi ini kekuasaan dan tanggung jawab ditentukan berdasarkan garis-garis yang menghubungkannya.
- b. Bentuk garis dan staff
 Bentuk organisasi ini hampir menyerupai dengan organisasi berbentuk garis, hanya saja dalam organisasi ini diperlukan seorang staff. Staff adalah seorang yang ahli dalam bidangnya yang membantu tugas dari pimpinan.

c. Organisasi fungsional

Bentuk struktur organisasi ini disusun berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut, misalnya fungsi administrasi dan lain-lain. Disini seorang pimpinan mempunyai hak untuk memerintah semua bawahannya selama masih berhubungan dengan bidang kerjanya.

Struktur organisasi pada PT Petrokimia Gresik adalah berbentuk garis dan staff, dimana sudah ada pembagian tugas dari masing-masing jabatan yang berguna untuk mempermudah dalam mengadakan pengawasan pekerjaan. Adapun Susunan dan Pembagian Kerja di masing-masing Direktorat :

a. Direktorat Utama

- 1) Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi, dan strategi perusahaan.
- 2) Memimpin para anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi dan mengesahkan semua Keputusan Direksi.
- 3) Mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal perusahaan, kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka panjang perusahaan, kebijakan audit, peningkatan kultur, citra dan tata kelola perseroan (GCG).
- 4) Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengawasan internal perusahaan.
- 5) Mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan persetujuan anggota Direksi lainnya pada Rapat Direksi.
- 6) Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas nama Direksi.
- 7) Menentukan keputusan Direksi, apabila dalam voting pada rapat Direksi terdapat jumlah suara yang sama banyak antara suara yang setuju dan tidak setuju.
- 8) Memilah dan memberikan informasi kepada stakeholder atas segala sesuatu tentang perusahaan.

b. Direktorat Komersil

- 1) Bidang Pemasaran

- a) Mengelola dan mengoptimalkan upaya-upaya pemasaran dan penjualan produk-produk yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan perencanaan dan strategi perusahaan.
 - b) Mengelola dan mengoptimalkan upaya-upaya pengadaan, distribusi, dan pergudangan diluar area pabrik.
 - c) Memimpin dan mengendalikan kegiatan perdagangan produk-produk diluar yang dihasilkan perusahaan baik yang dilakukan melalui kegiatan operasional sendiri maupun kerjasama kemitraan sesuai strategi yang ditetapkan perusahaan.
 - d) Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- 2) Bidang Administrasi Keuangan
- a) Memimpin dan mengendalikan pembuatan kebijakan, pengelolaan dan pelaporan keuangan mencakup kegiatan fungsi akuntansi, perbendaharaan dan pendanaan guna peningkatan kinerja perusahaan.
 - b) Melaksanakan dan pengendalian seluruh kebijakan keuangan sesuai keputusan Direksi serta melaksanakan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi keuangan perusahaan.
 - c) Mengkoordinasikan penyusunan RKAP serta pengendalian akuntansi atas biaya-biaya, pendapatan, dan keuntungan serta tingkat investasi perusahaan.
 - d) Mengkonsolidasi, mengendalikan, dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan arus kas perusahaan berdasarkan RKAP dalam rangka usaha peningkatan efisiensi.
 - e) Mengarahkan dan membina pengelola keuangan perusahaan meliputi kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, investasi, dan pendanaan.
 - f) Memimpin pembinaan karyawan sesuai peraturan yang berlaku.
 - g) Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Direktorat Produksi
- 1) Memimpin pengelolaan dan pengendalian kegiatan produksi secara efektif dan efisien dengan mengacu pada perencanaan dan strategi perusahaan.
 - 2) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3 & LH).
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan perusahaan supplier gas alam untuk kelancaran operasional pabrik.

- 4) Memimpin dan mengawasi pengelolaan pabrik dan fasilitas pendukung serta pemeliharaan rutin dan pemeliharaan tahunan.
 - 5) Mengelola, mengoptimalkan, dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Dermaga.
 - 6) Mengelola dan mengoptimalkan seluruh aktivitas sarana pendukung pabrik.
 - 7) Mengelola dan mengoptimalkan Pergudangan di area pabrik.
 - 8) Memimpin pembinaan karyawan sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Direktorat Teknik dan Pengembangan
- 1) Merancang strategi pengembangan dan investasi berdasarkan prioritas, ketersediaan sumber daya, teknologi, dan prospek bisnis.
 - 2) Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan investasi pengembangan sesuai rencana strategis perusahaan.
 - 3) Memimpin dan mengelola jasa rancang bangun dan perekayasaan serta jasa teknik lainnya.
 - 4) Mengelola dan mengawasi perencanaan serta pengendalian pengadaan barang dan jasa.
 - 5) Memimpin dan mengarahkan pengelolaan serta pengembangan aplikasi teknologi informasi yang disesuaikan dengan perkembangan usaha.
 - 6) Memimpin, mengarahkan, dan mengelola aktifitas perencanaan, sistem manajemen perusahaan, dan manajemen resiko.
 - 7) Memimpin dan mengarahkan pengelolaan armada angkutan kapal pupuk milik perusahaan yang disesuaikan dengan perkembangan usaha dan bisnis perusahaan.
 - 8) Menetapkan kebijakan pengadaan gas alam dan atau bahan baku lainnya, dan melakukan usaha pengadaan gas alam langsung dari sumber utama (Pemerintah, BP Migas, PT Pertamina, dan KKS lainnya) sesuai kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
 - 9) Membina dan mengawasi anak perusahaan.
 - 10) Memimpin pembinaan karyawan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 11) Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Direktorat SDM dan Umum
- 1) Memimpin dan mengarahkan penempatan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 2) Memimpin dan mengarahkan kegiatan transformasi organisasi perusahaan.

- 3) Mengendalikan sarana dan prasarana pelayanan umum secara efisiensi dan efektif.
- 4) Mengelola dan mengendalikan program kemitraan dan bina lingkungan.
- 5) Mengendalikan kegiatan pengelolaan asset perusahaan.
- 6) Memimpin dan mengarahkan aktifitas keamanan dan pengamanan lingkungan perusahaan.
- 7) Memimpin pembinaan karyawan sesuai peraturan yang berlaku.
- 8) Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
- 9) Melakukan pembinaan Yayasan.

Berikut adalah bagan struktur organisasi PT Petrokimia Gresik :



Gambar 4 : Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik
Sumber : Departemen Personalia PT Petrokimia Gresik, Tahun 2015

5. Anak Perusahaan PT Petrokimia Gresik

a. PT Petrosida Gresik

Pabrik yang menghasilkan bahan aktif pestisida dan 100% sahamnya dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1984 dan dimaksudkan untuk memasok bahan baku PT Petrokimia Kayaku. Adapun jenis produk yang dihasilkan yaitu : BPMC, MPC, Diazinon, Carbofuran dan Carbaryl.

b. PT Petrokimia Kayaku

Pabrik Formulator pestisida merupakan hasil kerja sama PT Petrokimia Gresik (kepemilikan saham 60%) dengan perusahaan Nippon Kayaku Co. Ltd (kepemilikan saham 20%) dan Mitsubishi Co. (kepemilikan saham 20%). Perusahaan ini beroperasi mulai tahun 1977, adapun jenis produk yang dihasilkan yaitu : pestisida cair, pestisida butiran dan pestisida tepung.

6. Perusahaan Patungan (*Joint Ventures*)

a. PT. Kawasan Industri Gresik (KIG)

Perusahaan patungan didirikan oleh PT Petrokimia Gresik (kepemilikan saham 35%) dengan PT Semen Gresik (kepemilikan saham 65%). Bisnis utama perusahaan ini adalah menyiapkan lahan, sarana prasarana dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan aneka industri, termasuk di dalamnya Kawasan Berikat Export Processing Zone (EPZ).

b. PT. Petronika

Perusahaan patungan dengan saham kepemilikan saham PT Petrokimia Gresik (20%) yang beroperasi pada tahun 1985. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah dengan menjadi produsen bahan Plasticizer Dioctyl Phthalate (DOP) dengan kapasitas 30.333 ton/thn.

c. PT. Petrocentral

Perusahaan patungan dengan kepemilikan saham PT. Petrokimia Gresik (9,8%). Bisnis utama perusahaan ini adalah Produsen Sodium Tripoly Phosphate (STPP).

7. Yayasan

Dalam perkembangannya PT Petrokimia Gresik memiliki beberapa yayasan antara lain :

a. PT Gresik Cipta sejahtera (GCS)

Berdiri pada tanggal 3 April 1972. Bidang usahanya meliputi distributor berbagai komoditi hasil produksi PT. Petrokimia Gresik, pemasok suku cadang pabrik dan bahan baku industri kimia, penyediaan armada angkutan bahan kimia dan pelaksana misi pembinaan usaha atau industri kecil.

b. PT Aneka Jasa Ghradika (AJG)

Didirikan sejak 10 November 1971. Bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja harian, jasa, borongan, cleaning service dan house keeping.

c. PT Graha Sarana Gresik (GSC)

Didirikan sejak tanggal 13 Mei 1993. Bergerak dibidang penyediaan akomodasi, persewaan perkantoran dan jasa travel.

d. PT Petrokopindo Cipta Selaras (PCS)

Didirikan sejak tanggal 13 Mei 1993 yang bergerak dibidang perbengkelan, angkutan, perdagangan umum dan jasa.

B. Penyajian Data

1. Mekanisme Pemungutan PPN dan PPnBM sebelum dan sesudah

PT Petrokimia Gresik Ditunjuk Sebagai Wajib Pungut

Saat PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai PKP, PT Petrokimia Gresik berusaha melakukan pembayaran dan pelaporan PPN secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPN serta penerimaan dokumen perpajakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta penerimaan dokumen perpajakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah membayar tepat waktu dan koordinasi dengan unit kerja serta Departemen yang lain terkait untuk memastikan dokumen perpajakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Langkah kerja pemungutan PPN sesuai dengan Lampiran 5 tentang Alur pemungutan PPN saat PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai PKP, sebagai berikut :

- 1) Penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara/PO yang disetujui atau ditandatangani oleh vendor dan Departemen Pengadaan.
- 2) Vendor melakukan penagihan kepada Departemen Akuntansi atas BKP dan/atau JKP yang telah diserahkan, di Departemen Akuntansi dilakukan pengecekan seperti Faktur Pajak, invoice, kuitansi, dll. Kemudian pada Departemen Keuangan Bagian Pembayaran melakukan pembayaran atas BKP dan/atau JKP yang diserahkan serta PPN-nya.
- 3) Vendor melakukan pemungutan serta memotong PPN yang telah dibayarkan oleh PT Petrokimia Gresik sebelumnya, dan memberikan bukti SSP.
- 4) Departemen Keuangan Bagian Pajak Pertambahan Nilai menerima bukti potong dari vendor, bukti potong atas BKP dan/atau JKP yang dapat dikreditkan akan menjadi Pajak Masukan (PM) dapat di kreditkan.
- 5) Setelah Departemen Keuangan Bagian PPN mengetahui Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, barulah dapat dihitung PPN yang terhutang menggunakan mekanisme pemungutan PPN secara

umum yaitu Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan (PK-PM).

- 6) Apabila dalam perhitungan (PK-PM) terdapat Pajak Keluaran lebih besar, maka PT Petrokimia Gresik dinyatakan Kurang bayar, kemudian PT Petrokimia Gresik akan menyetorkan Pajaknya.
- 7) Apabila dalam perhitungan (PK-PM) ternyata Pajak Masukan lebih besar, maka PT Petrokimia Gresik dinyatakan Lebih Bayar, lebih bayar tersebut akan direstitusikan.
- 8) Melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Seperti yang telah dijelaskan pada Lampiran 6 mengenai alur pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan PT Petrokimia Gresik pada saat dukukuhkan sebagai PKP. Sedikit berbeda dengan alur pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik setelah ditunjuk sebagai Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM. Alur pemungutan PPN dan PPnBM setelah PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Wajib Pungut, terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan Alur pemungutan PPN dan PPnBM saat PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai PKP. Perbedaan tersebut terletak pada kewajiban PT Petrokimia Gresik yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut yang wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang dipungut dari vendor atau rekanan secara tepat waktu dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah kerja pemungutan PPN sesuai dengan Lampiran 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Vendor atau rekanan melakukan Penyerahan BKP dan/atau JKP dengan penandatanganan Berita Acara/PO yang disetujui atau ditandatangani oleh vendor atau rekanan dengan Departemen Pengadaan.
- 2) Vendor atau rekanan melakukan penagihan kepada Departemen Akuntansi atas BKP dan/atau JKP yang telah diserahkan, di Departemen Akuntansi dilakukan pengecekan seperti Faktur Pajak, invoice, kuitansi, dll. Kemudian pada Departemen Keuangan Bagian Pembayaran melakukan pembayaran atas BKP dan/atau JKP yang diserahkan serta PPN-nya.
- 3) Pada Departemen Keuangan Bagian PPN, Faktur Pajak yang diterima dari Departemen Akuntansi akan di kelompokkan menjadi 2 sesuai dengan nominalnya serta melakukan pemeriksaan seperti tanggal tagihan tidak boleh melebihi tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak, NPWP, alamat vendor atau rekanan dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :
 - a. Kurang dari sama dengan Rp 10.000.000 menggunakan kode Faktur 01 (PPN yang dipungut oleh PKP Penjual).
 - b. Lebih dari Rp 10.000.000 menggunakan kode Faktur 030 (PPN yang dipungut oleh Pemungut selain Bendahara Pemerintah).

- 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan atas penunjukan sebagai Pemungut, dilakukan dengan pengisian SPT Masa Formulir 1107 PUT dilampiri dengan Faktur Pajak yang nominalnya melebihi Rp 10.000.000 (pemungutan, dihitung, serta dipotong sesuai dengan peraturan yang berlaku).
- 5) Mengimpor atau memasukkan data kedalam sistem Bank persepsi yang telah bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik secara elektronik. Hasilnya berupa SSP yang secara langsung masuk kedalam pembayaran vendor atau rekanan, serta setoran pajak secara otomatis telah dibayarkan.
- 6) Departemen Keuangan Bagian Pembayaran melakukan pencetakan atau bukti pembayaran.
- 7) Departemen Keuangan Bagian PPN mencetak SPT Masa PPN dalam 1 Masa Pajak.
- 8) Setelah semua berkas telah dipenuhi, maka Departemen Keuangan Bagian PPN melakukan pelaporan atas pungutan, penyetoran, serta perhitungan yang sudah dilakukan dalam 1 Masa Pajak PPN atau PPnBM.

Seperti yang dijelaskan pada Lampiran 7 mengenai alur pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik setelah ditunjuk sebagai WAPU PPN dan/atau PPnBM. Setelah mengetahui alur pemungutan PPN dan/atau PPnBM saat PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai PKP serta saat ditunjuk sebagai Wajib Pungut, dapat dilihat PT

Petrokimia Gresik melakukan kewajiban perpajakannya melalui SPT Masa PPN yang telah disetor dan dilaporkan setiap bulannya.

2. Kewajiban Perpajakan Terkait dengan Kepatuhan dalam Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPnBM Setelah Ditunjuk Sebagai Pemungut

a. Data Laporan Bulanan PPN Tahun 2014

Tabel 3 SPT Masa PPN Formulir 1111 Tahun 2014

Masa Pajak	Pembetulan	Tanggal Pelaporan	Dasar Pengenaan Pajak	PK yang dipungut sendiri	PM yang dapat dikreditkan	PPN yang masih harus dibayar	Keterangan (Bayar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 10% × (4)	(6)	(7) = (5) – (6)	(8)
Jan	0	27/02/2014	Rp 1.073.784.453.934	Rp 107.378.441.044	Rp 107.377.339.020	Rp 1.102.024	Kurang
Feb	0	27/03/2014	Rp 703.415.219.368	Rp 70.341.519.081	Rp 70.340.399.836	Rp 1.119.245	Kurang
Mar	0	29/04/2014	Rp 626.872.884.758	Rp 62.687.285.933	Rp 62.685.910.640	Rp 1.375.473	Kurang
Apr	1	13/06/2014	Rp 704.723.640.134	Rp 70.472.361.098	Rp 313.768.552.791	Rp 243.296.191.693	Lebih
Mei	3	26/02/2015	Rp 752.285.388.309	Rp 75.225.835.995	Rp 76.185.063.474	Rp 959.227.479	Lebih
Jun	0	22/07/2014	Rp 706.409.244.163	Rp 70.640.921.636	Rp 70.639.116.495	Rp 1.805.141	Kurang
Jul	4	26/01/2015	Rp 660.428.764.604	Rp 66.042.874.038	Rp 66.039.688.416	Rp 3.185.622	Kurang
Agus	2	27/10/2014	Rp 754.523.723.616	Rp 75.452.369.470	Rp 273.516.108.780	Rp 198.063.739.310	Lebih
Sep	0	27/10/2014	Rp 759.847.212.940	Rp 75.984.718.631	Rp 75.982.633.803	Rp 2.084.828	Kurang
Okt	1	13/03/2015	Rp 857.519.924.471	Rp 85.751.990.014	Rp 85.749.601.314	Rp 2.388.700	Kurang
Nov	0	23/12/2014	Rp 897.423.912.749	Rp 89.742.387.794	Rp 283.607.432.160	Rp 193.865.044.366	Lebih
Des	0	26/01/2015	Rp 992.004.167.641	Rp 99.200.413.589	Rp 99.198.835.226	Rp 1.578.363	Kurang
Jumlah			Rp 8.081.099.677.185	Rp 815.892.313.309	Rp 1.477.713.342.935	RP 636.169.563.632	Lebih

Sumber : Data diolah berdasarkan SPT Masa PPN Formulir 1111 PT Petrokimia Gresik Tahun 2014

Sesuai dengan Tabel 3 tentang SPT Masa PPN Formulir 1111 Tahun 2014 berisi jumlah penyerahan barang dan jasa serta perhitungan PPN yang masih harus dibayar yang mengakibatkan PPN kurang bayar atau lebih bayar. PPN yang telah dibayarkan PT Petrokimia Gresik telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk melengkapi SPT diperlukan data-data seperti Surat Setoran Pajak berisi tentang pelunasan pembayaran PPN dan/atau PPnBM, SPT Formulir 1111 AB merupakan rekapitulasi penyerahan dan perolehan, Formulir 1111 A1 merupakan daftar ekspor BKP berwujud serta BKP tidak berwujud atau JKP, Formulir 1111 A2 merupakan daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak, Formulir 1111 B1 daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, Formulir 1111 B2 merupakan daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri, Formulir 1111 B3 merupakan daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.

Pada SPT Masa PPN Normal bulan Januari, Februari, Maret, Juni, September, November, dan Desember tidak ada pembetulan. Pada Masa Pajak bulan April dan Oktober terdapat pembetulan ke-1, di bulan April terjadi lebih bayar sedangkan di bulan Oktober terjadi kurang bayar. Pembetulan ke-2 terjadi pada bulan Agustus yang mengakibatkan PPN yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar. Kemudian pada bulan Mei terjadi pembetulan ke-3 yang mengakibatkan PPN yang masih harus dibayar

menjadi lebih bayar. Setelah dilakukan pembetulan ke-4 pada bulan Juli terjadi kurang bayar.

Pada Tahun 2014 tidak terjadi penyerahan BKP yang tergolong mewah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 pada pasal 2 (dua), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tahun 2013. Kewajiban untuk mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Apabila batas waktu pelaporan dan penyeteroran bertepatan pada hari libur, maka pelaporan dan penyeteroran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. PT Petrokimia Gresik melakukan penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 saat dukukuhkan sebagai PKP. Pada tahun 2015 PT Petrokomia Gresik melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya PPN, berdasarkan analisis SPT Masa PPN Formulir 1111 dapat dilihat pada Tabel 4

b. Data Laporan Bulanan PPN Tahun 2015

Tabel 4 SPT Masa PPN Formulir 1111 Tahun 2015

Masa Pajak	Pembetulan	Tanggal Pelaporan	Dasar Pengenaan Pajak	PK yang dipungut sendiri	PM yang dapat dikreditkan	PPN yang masih harus dibayar	Keterangan (Bayar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 10% × (4)	(6)	(7) = (5) – (6)	(8)
Jan	1	26/02/2015	Rp 1.018.223.520.616	Rp 101.822.346.312	Rp 101.821.169.653	Rp 1.176.659	Kurang
Feb	0	30/03/2015	Rp 628.744.314.657	Rp 62.874.427.474	Rp 62.872.932.024	Rp 1.495.450	Kurang
Mar	0	26/04/2015	Rp 791.001.614.892	Rp 79.100.156.909	Rp 79.097.958.511	Rp 2.198.398	Kurang
Apr	1	29/09/2015	Rp 801.530.281.220	Rp 80.153.023.413	Rp 628.363.675.052	Rp 548.210.651.639	Lebih
Mei	0	29/06/2015	Rp 737.303.852.276	Rp 82.133.827.592	Rp 82.131.995.097	Rp 1.832.495	Kurang
Jun	0	30/07/2015	Rp 648.314.381.144	Rp 72.183.344.374	Rp 72.180.697.260	Rp 2.647.114	Kurang
Jul	0	24/08/2015	Rp 443.599.531.621	Rp 48.993.526.626	Rp 48.989.474.367	Rp 4.052.259	Kurang
Agus	0	29/09/2015	Rp 543.087.597.807	Rp 59.909.870.956	Rp 418.206.996.889	Rp 358.297.125.933	Lebih
Sep	0	29/10/2015	Rp 567.313.152.948	Rp 62.757.085.104	Rp 62.752.380.243	Rp 4.704.861	Kurang
Okt	0	26/11/2015	Rp 642.659.608.361	Rp 71.378.437.719	Rp 71.376.968.402	Rp 1.469.317	Kurang
Nov	0	30/12/2015	Rp 772.840.856.510	Rp 86.322.041.592	Rp 86.319.478.757	Rp 2.562.835	Kurang
Des	0	28/01/2016	Rp 861.984.956.203	Rp 95.447.412.680	Rp 95.445.554.422	Rp 1.858.258	Kurang
Jumlah			Rp 8.456.603.668.255	Rp 903.075.500.751	Rp 1.809.559.280.677	Rp 18.906.483.779.926	Lebih

Sumber : Data diolah berdasarkan SPT Masa PPN Formulir 1111 PT Petrokimia Gresik Tahun 2015

Sesuai dengan Tabel 4 tentang SPT Masa PPN Formulir 1111 Tahun 2015 berisi jumlah penyerahan barang dan jasa serta perhitungan PPN yang masih harus dibayar yang mengakibatkan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Pada SPT Masa PPN tahun 2015 terkait dengan laporan bulanan setelah dilakukannya pembetulan, lebih banyak terjadi Kurang Bayar. Kurang Bayar yang terjadi merupakan salah satu bentuk tax planning yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik. Akibat dari pembetulan SPT Masa PPN dan/atau PPnBM yang lebih bayar dilakukan restitusi pada masa pajak berikutnya. Restitusi dilakukan setiap 4 bulan sekali setelah berakhirnya Masa Pajak. Seperti yang disampaikan oleh Staff Ahli PPN berikut

“Kurang Bayar merupakan salah satu bentuk tax planning yang dilakukan PT Petrokimia Gresik Lebih Bayar yang terjadi akan dilakukan restitusi, PT Petrokimia Gresik melakukan restitusi setiap 4 bulan sekali”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.30 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

Pada SPT Normal pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tidak ada pembetulan. Pada SPT Normal bulan Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, November, dan Desember terjadi Kurang Bayar atas PPN yang masih harus dibayar, sedangkan pada bulan Agustus terjadi Lebih Bayar atas PPN yang masih harus dibayar. Pada Masa Pajak bulan Januari dan April terjadi pembetulan ke-1. Pada Masa Pajak bulan Januari terjadi Kurang Bayar, sedangkan pada Masa Pajak bulan April terjadi Lebih Bayar atas PPN yang masih harus dibayar.

Untuk melengkapi laporan SPT diperlukan lampiran seperti SPT Masa PPN Formulir 1111 AB, SPT Formulir 1111 AB merupakan rekapitulasi penyerahan dan perolehan, Formulir 1111 A1 merupakan daftar ekspor BKP berwujud serta BKP tidak berwujud atau JKP, Formulir 1111 A2 merupakan daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak, Formulir 1111 B1 daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, Formulir 1111 B2 merupakan daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri, Formulir 1111 B3 merupakan daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas, Surat Setoran Pajak berisi tentang pelunasan pembayaran PPN dan/atau PPnBM. Untuk bulan April sampai dengan bulan Desember, terdapat tambahan lampiran yaitu SPT Masa PPN Formulir 1170 PUT beserta Faktur Pajaknya. Terjadinya tambahan lampiran dikarenakan PT Petrokimia Gresik melakukan kewajiban perpajakannya sebagai Pemungut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian PARANSI

“Sesudah ditetapkan sebagai pemungut, PT Petrokimia Gresik memerlukan kerja ekstra karena segala transaksi pemungutan PPN pihak PT Petrokimia Gresik yang wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajaknya dan juga vendor atau rekanan sering meminta bukti setor pajaknya untuk pengkreditan pajak”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.00 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

Pada tahun 2015 tidak terjadi penyerahan BKP yang tergolong mewah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 pasal 2 (dua), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tahun 2013

maka tidak terjadi pemungutan PPnBM. Saat awal penunjukan PT Petrokimia Gresik sebagai Pemungut PPN dan/atau PPnBM, tentu saja terdapat hambatan yang harus dihadapi, akan tetapi PT Petrokimia Gresik juga memiliki cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

3. Hambatan-hambatan yang Muncul Terkait Penunjukan PT

Petrokimia Gresik Sebagai Wajib Pungut PPN dan PPnBM serta Cara Menanganinya

Pada tahun 2015, perusahaan mengalami masa transisi dari ketentuan sebelum penunjukan Wajib Pungut (WAPU) dan setelah menjadi Wajib Pungut (WAPU). Bulan Januari sampai bulan Maret untuk memenuhi kewajiban PPN, setiap Masa Pajak dilakukan sesuai dengan mekanisme secara umum yaitu PT Petrokimia Gresik selaku PKP menggunakan mekanisme pemungutan PPN Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan (PK-PM). Sedangkan pada bulan April sampai bulan Desember, PT Petrokimia Gresik berstatus sebagai Pemungut, yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terhutang.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik selaku salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU) dipaparkan oleh Kepala Bagian PARANSI

“Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh vendor yang menjadi PKP, semuanya dibebankan oleh PT Petrokimia Gresik”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.00 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

Adapun menurut Staff Ahli PPN

“Resiko yang kami hadapi lebih besar karena kewajiban vendor menjadi kewajiban kita. Resiko salah bayar menjadi lebih besar”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.30 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

PT Petrokimia Gresik memiliki cara untuk menangani atau menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul saat Penunjukannya sebagai BUMN Wajib Pungut. Cara yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik yaitu dengan melakukan koreksi terhadap seluruh rekanan yang menjadi rekan bisnisnya, selalu mengontrol setiap transaksi yang dilakukan, serta melakukan kerja sama dengan pihak Bank persepsi untuk mempermudah penyetoran PPN yang dupungut. Seperti yang dipaparkan oleh Staff Ahli PPN “Melakuakn filter terhadap vendor atau rekanan yang akan menjadi rekan bisnis, kontrolling lebih di perketat, kami melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) yaitu Bank persepsi”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.30 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik). PT Petrokimia Gresik melakukan kerja sama dengan Bank persepsi dipertegas oleh Kepala Bagian PARANSI

“PT Petrokimia Gresik bekerja sama dengan pihak Bank persepsi contohnya BNI. Dengan membuka ebanking (e-tax), PT Petrokimia Gresik melakukan pembayaran melalui rekening, dengan seperti itu pihak Bank persepsi membuat SSP yang kemudian secara otomatis pembayaran dan bukti potong masuk ke vendor atau rekanan bisnis”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.00 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

C. Pembahasan

1. Implementasi Pemungutan PPN dan PPnBM PT Petrokimia Gresik Yang Ditunjuk Sebagai Wajib Pungut

Pada dasarnya perlakuan PPN yang diterapkan oleh perusahaan secara garis besar memiliki kesamaan diantaranya, persamaan tarif tunggal PPN yaitu sebesar 10%, sama-sama disetorkan ke kas negara, dan pengenaannya dilakukan sekali untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam aspek pemungutannya yang dilakukan oleh Pemungut PPN dan Pengusaha Kena Pajak atau Bukan Pemungut. Maksud dari Pemungut PPN diantaranya Bendaharawan Pemerintah, Badan usaha tertentu, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP. Diantara Badan usaha tertentu yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN salah satunya adalah BUMN. Diantara BUMN yang ditunjuk sebagai Pemungut merupakan BUMN yang telah dilakukan restrukturisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK03/2015, dimana Peraturan Menteri ini juga mengatur teknis pelaksanaan pemungutan BUMN sebagai Wajib Pungut yaitu PT Petrokimia Gresik.

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan yang terdaftar menjadi BUMN sebagai Wajib Pungut PPN dan PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK03/2015 tentang penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut PPN oleh Menteri Keuangan pada tanggal 4

Maret 2015, berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 2015. PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan manufaktur, khususnya penghasil pupuk yang ada di Indonesia, diantaranya urea dan ZA, SP-36 dan ZK, phonska dan NPK, pupuk Spesifikasi komoditi, petrogranik, petro biofertil, KCL dan rock phosphate. Sebelumnya PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.000.032.1-051.000. PT Petrokimia Gresik memiliki rekan bisnis untuk membantu dalam kelancaran bisnis yang dijalankannya. Rekan bisnis PT Petrokimia Gresik selanjutnya disebut vendor atau rekanan yang melakukan penyerahan atau pengadaan barang dan/atau jasa. PT Petrokimia Gresik merupakan PKP yang kemudian ditunjuk sebagai Pemungut, atas penunjukan tersebut terdapat perbedaan dalam perlakuan pemungutan PPN. Perbedaan Mekanisme Pemungutan PPN dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Mekanisme Pemungutan PPN Secara Umum

Sebelum PT Petrokimia Gresik di kukuhkan sebagai Pemungut, PT Petrokimia Gresik memiliki status sebagai PKP. Saat menjadi PKP terjadi penyerahan barang maupun jasa pemungutan PPN dilakukan secara normal yaitu PPN dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh pihak PT Petrokimia Gresik selaku sebagai penjual. Untuk menentukan PPN yang masih harus dibayar dapat dihitung dengan Pajak Keluaran (PK) dikurangi dengan Pajak Masukan (PM). Jatuh tempo penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa

pajak sebelum penyampaian SPT Masa dan disetorkan menggunakan SSP melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos. Untuk batas pelaporannya dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak kepada KPP terdaftar. Apabila batas waktu yang ditentukan tepat pada hari libur maka harus disetorkan dan dilaporkan pada hari berikutnya.

b. Mekanisme Pemungutan PPN Secara Khusus

Pemungut PPN diantaranya Bendaharawan Pemerintah, Badan, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk memungut, melapor, dan menyetorkan pajak terhutang yang telah dipungut. Setiap penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat membuat surat tagihan kepada Pemungut PPN wajib membuat Faktur Pajak. Dalam surat tagihan tercantumkan harga jual atau penggantian dan PPN, namun pada saat penerimaan pembayaran PKP hanya menerima sebesar harga jual. Pemungut PPN telah memungut pajak yang terhutang kemudian melaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPnBM dilakukan setiap bulannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan SSP tercantum sebagai lampiran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 kepada KPP terdaftar. Setelah itu SSP dan bukti potong diserahkan kepada PKP

yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Pemungut PPN dan/atau PPnBM wajib menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut ke Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, serta wajib melaporkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015.

Pada tahun 2015 PT Petrokimia Gresik melakukan Wajib Pungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh vendor atau rekanan. Rekanan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP akan dipungut PPN dan/atau PPnBM, maka pembayaran yang akan diterima oleh rekanan hanya sebesar harga jual barang atau jasa, karena PPN dan/atau PPnBM atas BKP dan/atau JKP tersebut akan disetorkan ke kas negara oleh PT Petrokimia Gresik. Penyetoran ke kas negara yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik melalui Bank persepsi, kemudian Bank Persepsi mengeluarkan bukti pungut berupa SSP yang memuat identitas (nama, alamat, NPWP) rekanan, SSP tersebut secara otomatis masuk dalam sistem rekanan. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran dilakukan setiap bulan dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT. Bagi Pemungut PPN wajib melampirkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015.

Mekanisme pemungutan PPN saat PT Petrokimia Gresik menjadi PKP dan ditunjuk sebagai Pemungut, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut terdapat pada perlakuan Pajak Masukan serta penyeteroran PPN. Seperti yang dipaparkan oleh Staff Ahli PPN

“Sebelum WAPU lebih mudah sebelum seperti sekarang, kalau sekarang kita langsung menyetorkan ke kas negara, tidak ada lagi mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dan tidak berlaku lagi, vendor pasti akan lebih bayar”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.30 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

Tabel 5 Penyerahan BKP dan/atau JKP

Nama Rekanan	NPWP	Kode Faktur	DPP	PPN
CV Abadi Sentosa	01.693.418.4-604.000	010.003	Rp 870.000	Rp 87.000
CV Agro Investama	01.834.813.6-609.000	030.000	Rp 22.350.543	Rp 2.235.053
PT Adhiguna Putera	01.061.033.5-093.000	010.003	Rp 5.300.000	Rp 530.000
PT Ara Bontobiraeng	03.135.496.2-806.000	030.001	Rp 14.629.500	Rp 1.462.950
PT Berkat Anugerah	01.739.721.7-611.000	030.000	Rp 35.166.250	Rp 3.516.625

Sumber : Data Diolah Peneliti (2016) berdasarkan SPT Masa PPN 2015

Berdasarkan Tabel 5 tentang Penyerahan BKP dan/atau JKP berdasarkan SPT Masa PPN tahun 2015, kode transaksi dibedakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 sebagai berikut :

- c. Kode transaksi yang digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dengan nominal dibawah Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 memakai kode awal “010”. PPN yang terhutang atas penyerahan tersebut dipungut oleh PKP Rekanan Penjual.

- d. Kode transaksi yang digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dengan nominal diatas Rp 10.000.000 memakai kode awal “030”. PT Petrokimia Gresik wajib untuk memungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP tersebut.

Berdasarkan analisis dari peneliti PT Petrokimia Gresik mengalami perubahan terkait pemungutan PPN dan/atau PPnBM. Pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan PT Petrokimia Gresik selaku BUMN yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015. Kriteria Wajib Pungut dapat dibedakan menurut Faktur Pajak, dengan perhitungan DPP ditambah dengan PPN melebihi dari Rp 10.000.000. Jika DPP ditambah dengan PPN kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000 maka Faktur Pajak tersebut tidak masuk dalam kriteria Wajib Pungut.

Tabel 6 Perbedaan PKP dengan Wajib Pungut

Keterangan	PKP	WAPU
Nilai Transaksi	≤Rp 10.000.000	>Rp 10.000.000
Kode Transaksi	01	03
Pembayaran Tagihan	100%DPP + 10%PPN	100%DPP
Pemungutan dan Penyetoran	PKP selaku Penjual	BUMN yang ditunjuk sebagai WAPU
Pelaporan PPN	SPT 1111	SPT 1111 dan SPT 1107 PUT

Sumber : Data diolah peneliti (2016)

Perubahan peraturan tentang pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan pemerintah dirasa perlu untuk melindungi penerimaan negara. Sebelum penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM, sering kali terjadi tidak disetorkannya PPN yang dipungut oleh PKP selaku penjual BKP dan/atau JKP, hal ini mengakibatkan PKP selaku pembeli

seperti PT Petrokimia Gresik tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian PARANSI.

“Apabila PT Petrokimia Gresik membeli barang kepada vendor yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka PT Petrokimia Gresik yang harus membayarkan pajak PPN-nya kepada vendor tersebut. Kadang kala rekanan nakal tidak melaporkan pungutan yang sudah dibayar PT Petrokimia Gresik, akibatnya pajak yang seharusnya di setor ke kas negara tidak disetorkan oleh vendor atau rekanan dampaknya pajak yang seharusnya dapat dikreditkan menjadi fiktif atau tidak valid, maka PT Petrokimia Gresik menanggung dan diperiksa Fiskus”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.00 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

PT Petrokimia Gresik yang baru ditunjuk sebagai Pemungut pada tahun 2015, melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Berikut perolehan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran saat menjadi PKP dan berstatus sebagai Badan Usaha Wajib Pungut.

Tabel 7 Masa Transisi dari PKP menjadi Badan Usaha WAPU

Masa Pajak	DPP	PK yang dipungut sendiri	PM yang diperhitungkan		Keterangan
			PM non WAPU	PM WAPU	
Jan	Rp 1.018.223.520.616	Rp 101.822.346.312	Rp 101.821.169.653	-	Non WAPU
Feb	Rp 628.744.314.657	Rp 62.874.427.474	Rp 62.872.932.024	-	
Mar	Rp 791.001.614.892	Rp 79.100.156.909	Rp 79.097.958.511	-	
Σ	Rp 2.437.969.450.165	Rp 243.796.930.695	Rp 243.792.060.188		
Apr	Rp 801.530.281.220	Rp 80.153.023.413	Rp 628.363.675.052	Rp 106.372.081.169	WAPU
Mei	Rp 737.303.852.276	Rp 82.133.827.592	Rp 82.131.995.097	Rp 93.938.623.731	
Jun	Rp 648.314.381.144	Rp 72.183.344.374	Rp 72.180.697.260	Rp 78.325.628.346	
Jul	Rp 443.599.531.621	Rp 48.993.526.626	Rp 48.989.474.367	Rp 53.371.547.795	
Agu	Rp 543.087.597.807	Rp 59.909.870.956	Rp 418.206.996.889	Rp 64.485.506.180	
Sep	Rp 567.313.152.948	Rp 62.757.085.104	Rp 62.752.380.243	Rp 89.078.556.566	
Okt	Rp 642.659.608.361	Rp 71.378.437.719	Rp 71.376.968.402	Rp 88.604.245.096	
Nov	Rp 772.840.856.510	Rp 86.322.041.592	Rp 86.319.478.757	Rp 90.856.910.211	
Des	Rp 861.984.956.203	Rp 95.447.412.680	Rp 95.445.554.422	Rp 154.316.683.779	
Σ	Rp 5.217.103.936.870	Rp 579.125.546.643	Rp 937.403.545.347	Rp 712.977.701.704	

Sumber : Data diolah peneliti (2016) berdasarkan SPT Masa PPN PT Petrokimia Gresik tahun 2015

Berdasarkan analisis peneliti dari Tabel 7 tentang Masa transisi dari PKP menjadi Badan Usaha Wajib Pungut, PT Petrokimia Gresik pada tahun 2015

mengalami perubahan mengenai tata cara pemungutan PPN dan PPnBM. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret, PT Petrokimia Gresik bertatus sebagai PKP masih menggunakan mekanisme pemungutan secara normal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu (PK-PM). Sedangkan pada bulan April sampai dengan bulan Desember PT Petrokimia Gresik telah dikukuhkan sebagai Badan Usaha yang wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terhutang. PT Petrokimia Gresik telah bekerja sama dengan pihak Bank persepsi sejak awal masa transisinya sebagai Badan Usaha Wajib Pungut. Kerja sama yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik dengan Bank BNI bertujuan untuk mempermudah perusahaan untuk menyetorkan PPN dan PPnBM Wajib Pungut. Jadi, implementasi pemungutan PPN dan/atau PPnBM pada PT Petrokimia Gresik saat menjadi PKP maupun setelah penunjukannya sebagai Wajib Pungut tidak terjadi perubahan yang signifikan, hanya saja perbedaan dalam proses pelaporan serta pembayaran.

2. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Berkaitan Dengan Kepatuhan

Pelaporan dan Penyetoran PPN Sesudah Menjadi Wajib Pungut

Unit kerja pada setiap Departemen yang melakukan permintaan pengadaan barang, merupakan pihak yang melakukan transaksi dengan rekanan. Rekanan melakukan penyerahan barang yang telah di sepakati sebelumnya melalui Departemen Pengadaan, di dukung dengan dokumen-dokumen seperti kontrak perjanjian dan surat pembelian barang. Apabila rekanan melakukan penyerahan berupa JKP, maka harus dilengkapi dengan

Faktur Pajak. Sedangkan apabila rekanan melakukan penyerahan berupa BKP, maka harus dilampiri dengan Faktur Pajak dan invoice sesuai dengan kondisi barang, kemudian Departemen Pengadaan membuat berita acara/PO. Data-data yang telah diserahkan akan masuk di Departemen Akuntansi untuk dilakukan penagihan atas barang atau jasa yang telah dikirimkan sebelumnya. Departemen Akuntansi akan melakukan pengecekan seperti Faktur Pajak, invoice, kuitansi, dll apakah telah sesuai dengan barang yang dikirimkan, apabila salah satu persyaratan belum sesuai maka akan dikembalikan kepada rekanan untuk dilakukan pencetakan ulang persyaratan tersebut. Setelah Faktur Pajak, invoice, kuitansi telah sesuai, Departemen Keuangan Bagian Pembayaran melakukan verifikasi terhadap syarat formal pengisihan Faktur Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktur Pajak yang telah dilakukan pengecekan serta telah di verifikasi, akan dilakukan proses pembayaran sebesar harga jual barang/jasa tersebut. Faktur Pajak yang diterima tidak hanya tercetak 1 (satu) lembar tetapi akan terlampir banyak Faktur Pajak. Salah satu cara Departemen Keuangan Bagian PPN menerima Faktur Pajak ialah dengan menerima bentuk fisik Faktur Pajak setiap hari. Faktur Pajak tersebut akan digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Faktur Pajak dengan kode 010 untuk penyerahan BKP/JKP NON WAPU
- b. Faktur Pajak dengan kode 030 untuk penyerahan BKP/JKP WAPU

Bagian PPN tidak terlibat langsung dengan rekanan dalam penyerahan BKP/JKP, karena hanya mendapatkan dokumen dari unit kerja lain. Apabila masih terdapat kesalahan dalam pengisian Faktur Pajak seperti masih kurang lengkap pengisiannya atau cacat serta tanggal Faktur Pajak melebihi batas pelaporan, maka Faktur Pajak tersebut akan dikembalikan kepada rekanan. Faktur Pajak yang tidak mendapat kesalahan akan dikelompokkan sesuai dengan jenis PPN Masukan yang dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan :

- a. Faktur Pajak yang dapat dikreditkan akan dikelompokkan menurut NPWP sebagai lampiran SPT Masa.
- b. Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau PPN yang dibebaskan akan dikelompokkan menurut NPWP sebagai lampiran SPT Masa.

Setiap akhir bulan Bagian PPN akan melakukan pengumpulan data untuk Faktur Pajak Wajib Pungut dan Faktur Pajak Non Wajib Pungut. Seluruh Faktur Pajak akan dimasukkan ke sistem untuk dilakukan pencocokan dengan bentuk fisik Faktur Pajak yang telah disortir. Selanjutnya untuk proses pembayaran, PT Petrokimia Gresik telah bekerja sama dengan Bank BNI untuk penyetoran PPN, dilakukan dengan pengisian E-Tax yang telah disediakan oleh Bank BNI agar dapat mengunduh lampiran dokumen Wajib Pungut. Setelah pengisian E-Tax dokumen Wajib Pungut dapat diunduh oleh Bank tanpa mengirimkan lampiran Faktur Pajak sebagai dokumen pelengkap pembayaran. Pembayaran PPN Wajib Pungut langsung disetorkan ke kas negara melalui Bank

menggunakan SSP dan dilampiri dengan daftar nominatif, sedangkan untuk pelaporannya menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT. Pada saat yang bersamaan di akhir bulan terkait pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1111, dilakukan pengelompokan Faktur Pajak berbentuk fisik dari Faktur Pajak Wajib Pungut yang telah di urutkan berdasarkan NPWP yang mempunyai kode Faktur 030 dan Faktur Pajak Non Wajib Pungut yang memiliki kode Faktur 010. Selajutnya dilakukan penggabungan Faktur Pajak dan dipilah kembali menjadi Faktur Pajak yang dapat dikreditkan serta Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan.

Setelah dilakukan pemisahan berdasarkan analisis tersebut, Faktur Pajak akan diurutkan berdasarkan Kode Faktunya yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian Faktur Pajak Wajib Pungut digabungkan dengan Faktur Pajak Non Wajib Pungut sebagai dasar pembuatan Laporan SPT Masa PPN Formulir 1111. Berikut penyeteran dan pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1111 tahun 2015.

Tabel 8 Pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1111 tahun 2015

Masa Pajak	Pembetulan	Tanggal Pelaporan	PPN yang masih harus dibayar	Keterangan
Januari	1	26/02/2015	Rp 1.176.659	Kurang Bayar
Februari	0	30/03/2015	Rp 1.495.450	Kurang Bayar
Maret	0	26/04/2015	Rp 2.198.398	Kurang Bayar
April	1	29/09/2015	Rp 548.210.651.639	Lebih Bayar
Mei	0	29/06/2015	Rp 1.832.495	Kurang Bayar
Juni	0	30/07/2015	Rp 2.647.114	Kurang Bayar
Juli	0	24/08/2015	Rp 4.052.259	Kurang Bayar
Agustus	0	29/09/2015	Rp 358.297.125.933	Lebih Bayar
September	0	29/10/2015	Rp 4.704.861	Kurang Bayar
Oktober	0	26/11/2015	Rp 1.469.317	Kurang Bayar
November	0	30/12/2015	Rp 2.562.835	Kurang Bayar
Desember	0	28/01/2016	Rp 1.858.258	Kurang Bayar

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan SPT Masa PPN 1111 tahun 2015

Berdasarkan Tabel 8 tentang Pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1111 tahun 2015, tidak terjadi pembetulan pada bulan Februari dan Maret. Jadi batas akhir tanggal pelaporan SPT PPN tahun 2015 pada akhir bulan berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 42 tahun 2009). Pada bulan Februari dan Maret masih berlaku sistem pemungutan PPN secara normal yaitu PK-PM.

Pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember juga tidak terjadi pembetulan. Tanggal batas akhir pelaporan SPT PPN tahun 2015 pada akhir bulan berikutnya sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Mulai bulan Mei, PT Petrokimia Gresik wajib untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terhutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh rekanan. Pada bulan yang tidak terjadi pembetulan mengalami Kurang Bayar PPN, kecuali pada bulan Agustus mengalami Lebih Bayar PPN dikarenakan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dan dipungut lebih besar dari pada Pajak Keluaran.

Terjadi pembetulan 1 kali pada bulan Januari dan April. Pada bulan Januari terjadi Kurang Bayar PPN tetapi tanggal penyetorannya tidak melebihi batas akhir yaitu pada akhir bulan berikutnya. Sedangkan pada bulan April terjadi Lebih Bayar yang mengakibatkan pemeriksaan SPT Masa PPN oleh Fiskus, akibatnya tanggal batas akhir penyetoran akibat pembetulan melebihi tanggal batas akhir yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu pada akhir bulan berikutnya.

Setiap kurang bayar yang terjadi akan dilakukan pembayaran menggunakan SSP dan akan disetorkan langsung ke kas negara melalui Bank persepsi. Sedangkan setiap Lebih bayar yang terjadi merupakan salah satu *tax planning* yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik. Lebih Bayar akan dilakukan atau dibebankan setiap 4 bulan sekali, dan akan melakukan restitusi setiap Lebih bayar yang terjadi.

Pada tahun 2015 PT Petrokimia Gresik mengalami masa transisi dari PKP menjadi Badan Usaha Wajib Pungut. Saat menjadi Wajib Pungut SPT yang dilaporkan tidak hanya SPT Masa PPN Formulir 1111 tetapi juga melaporkan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT. SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT digunakan untuk melaporkan PPN yang telah dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh rekanan. Berikut adalah penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT.

Tabel 9 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT tahun 2015

Masa Pajak	Pembetulan	PPN yang Dipungut	Tanggal Pelaporan	Tanggal Penyetoran
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	0	Rp 106.372.081.169	28/05/2015	12/06/2015
Mei	0	Rp 93.938.623.731	29/06/2015	12/06/2015
Juni	0	Rp 78.325.628.346	30/07/2015	12/07/2015
Juli	0	Rp 53.371.547.795	24/08/2015	12/08/2015
Agustus	0	Rp 64.485.506.180	29/09/2015	12/09/2015
September	0	Rp 89.078.556.566	29/10/2015	12/10/2015
Oktober	0	Rp 88.604.245.096	26/11/2015	12/11/2015
November	0	Rp 90.856.910.211	29/12/2015	12/12/2015
Desember	0	Rp 154.316.683.779	26/01/2016	12/01/2016

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan SPT 1107 PUT tahun 2015

Sesuai Tabel 9 tentang Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT tahun 2015, PT Petrokimia Gresik mengalami perubahan atas pemungutan PPN. Perubahan tersebut terjadi pada bulan Mei dimana PT Petrokimia Gresik mulai menerapkan Wajib Pungut dan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1170 PUT untuk pelaporan atas pungutanannya. PT Petrokimia Gresik ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Wajib Pungut melalui PMK Nomor 37/PMK.03/2015 yang menjelaskan mengenai penunjukan badan usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya pada bulan Maret.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Petrokimia Gresik dalam hal penyetoran serta pelaporan telah sesuai dengan PMK 37/PMK.03/2015 tepatnya pada pasal 6 (enam) ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) yaitu Badan Usaha tertentu wajib menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya serta disetorkan ke KPP terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dalam bentuk elektronik (e-SPT). PT Petrokimia Gresik sebelumnya berstatus sebagai PKP, maka kewajiban untuk pelaporan SPT-nya menggunakan SPT Formulir 1111 dan SPT Formulir 1107 PUT.

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret, PT Petrokimia Gresik berstatus sebagai PKP dan belum ditetapkan sebagai Wajib Pungut, maka penyetoran PPN yang masih harus dibayar dilakukan pada akhir bulan

setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT disampaikan. Sedangkan pada bulan April sampai bulan Desember PT Petrokimia Gresik berstatus sebagai PKP serta telah ditetapkan sebagai Wajib Pungut, maka penyetoran PPN yang masih harus dibayar dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Perbedaan PKP dan Badan Usaha Wajib Pungut berdasarkan analisis terjadi pada penetapan batas akhir tanggal penyetoran PPN yang masih harus dibayar, sedangkan untuk pelaporan SPT yang berlaku untuk PKP maupun Badan Usaha Wajib Pungut penetapan batas akhirnya sama yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Selama tahun 2015, PT Petrokimia Gresik tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran PPN yang telah dipungut. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Bidang PARANSI

“Tidak pernah terjadi keterlambatan, karena PT Petrokimia Gresik punya siasat agar tidak terjadi keterlambatan yaitu dengan memberlakukan pengumpulan Faktur Pajak oleh vendor atau rekanan maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.00 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

3. Hambatan-Hambatan yang Terjadi Saat Penunjukan Menjadi

WAPU serta Cara Mengatasinya

PT Petrokimia Gresik merupakan salah perusahaan yang sahamnya sebagian besar oleh dimiliki negara. Tetapi pada pertengahan tahun 1997, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1997, pemerintah secara tidak langsung menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja menjadi holding company atau perusahaan induk untuk BUMN pupuk di Indonesia. Tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, dalam PP ini pemerintah mengalihkan seluruh

sahamnya yang dimiliki salah satunya pada PT Petrokimia Gresik kepada PT Pupuk Sriwidjaja. Pada tahun 2012, PT Pupuk Sriwidjaja berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia Holding Company.

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company. Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 juga memberlakunya PT Petrokimia Gresik untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan peraturan terkait dengan penunjukan Badan Usaha tertentu yang dilakukan restrukturisasi menjadi Wajib Pungut pada bulan April tahun 2015. Pada proses awal penunjukan tentunya PT Petrokimia Gresik mengalami ketidaksiapan dalam menghadapi resiko keuangan maupun resiko administrasi.

Resiko keuangan yang dihadapi PT Petrokimia Gresik sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 pada pasal 6 (enam) ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) yaitu Badan Usaha tertentu wajib menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya serta disetorkan ke KPP terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Resiko administrasi yang dihadapi tentunya berkaitan dengan ketepatan penyetoran

dan pelaporan PPN yang telah dipungut oleh Badan Usaha Wajib Pungut sesuai dengan pasal 6 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga). Apabila PT Petrokimia Gresik selaku Badan Usaha yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 37/PMK.03/2015 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan sebesar 2% (dua persen) perbulan apabila Badan Usaha terlambat melakukan penyetoran. Serta dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila Badan Usaha terlambat untuk pelaporan PPN.

Resiko yang harus dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik tidak menutup kemungkinan bila suatu saat PT Petrokimia Gresik akan terlambat menyetor atau melaporkan PPN Pungutannya. Apabila kelalaian terjadi akibat Badan Usaha sendiri maka tanggungjawab atas sanksi administrasi ditanggung oleh Badan Usaha sendiri, begitu juga sebaliknya apabila kelalaian disebabkan karena rekanan yang memberikan Faktur Pajak cacat atau terlambat maka sanksi administrasi akan di tanggung oleh rekanan. Resiko tersebut terjadi dikarenakan pemungutan yang seharusnya dilakukan oleh PKP selaku penjual BKP dan/atau JKP menjadi pekerjaan PT Petrokimia Gresik selaku Badan Usaha yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Bidang PARANSI

“Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh vendor yang menjadi PKP, semuanya dibebankan oleh PT Petrokimia Gresik.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.00 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

Serta dipertegas oleh Staff Ahli PPN

“Resiko yang kami hadapi lebih besar karena kewajiban vendor menjadi kewajiban kita, resiko salah bayar menjadi lebih besar.”(Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.30 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan pada PT Petrokimia Gresik, hambatan-hambatan yang terjadi atas penunjukan Badan Usaha yang dilakukan restrukturisasi sebagai Pemungut PPN terjadi pada awal penunjukan yaitu pada bulan April 2015. Akan tetapi PT Petrokimia Gresik memiliki cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul saat penunjukan Badan Usaha restrukturisasi sebagai Wajib Pungut sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 yaitu dengan :

- a. Melakukan seleksi untuk memilih dan bekerja sama dengan vendor atau rekanan.
- b. Melakukan kontroling terhadap masuknya Faktur Pajak.
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) yaitu Bank BNI.

Penunjukan Badan Usaha yang dilakukan restrukturisasi sebagai Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM dirasa sangat perlu diterapkan. Penunjukan Badan Usaha tersebut selain untuk memudahkan jalannya pemungutan PPN dan/atau PPnBM, juga akan dapat melindungi aset negara yaitu penerimaan kas negara dari sektor PPN dan/atau PPnBM. Seperti yang dijelaskan oleh Staff Ahli PPN :

“Lebih sederhana sebelum WAPU, dan pekerjaan tidak sebanyak ini, resiko yang kita tanggung tidak sebesar sekarang. Dari segi pekerjaan tidak ada untungnya bagi kita, tapi bagi negara hal ini dapat menyelamatkan uang negara.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret pukul 10.30 WIB di Lantai 1 Gedung Utama PT Petrokimia Gresik).

Penunjukan Badan Usaha sebagai Wajib Pungut akan meningkatkan penerimaan kas negara dari sektor PPN dan/atau PPnBM. Tetapi, bagi karyawan Badan Usaha yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut, penunjukan tersebut menambah beban pekerjaan dan resiko. Beban pekerjaan dan resiko yang ditanggung oleh karyawan terjadi karena karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh transaksi PPN dan PPnBM kekurangan tenaga ahli.

Tabel 10 Ringkasan Implementasi WAPU PPN dan PPnBM (pada PT Petrokimia Gresik)

No	Pembahasan	Kondisi saat ini	Kondisi ideal
1.	Saat PT Petrokimia Gresik dikukuhkan sebagai PKP	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap pemungutan PPN dilakukan oleh PKP - Menggunakan Mekanisme (PK-PM) - Sesuai dengan UU PPN No 42 tahun 2009 	- Kondisi ini telah sesuai dengan UU PPN No 42 tahun 2009
	Setelah PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Wajib Pungut	<ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan PPN dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk - Sesuai dengan PMK 37/PMK.03/2015 	- Kondisi ini telah sesuai dengan PMK No 37/PMK.03/2015
2.	Pemenuhan kewajiban PT Petrokimia Gresik setelah ditunjuk sebagai Wajib Pungut	- Menyetorkan pungutannya kepada Bank BNI pada tanggal 12 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	- Sesuai dengan PMK 37/PMK.03/2015 dengan tidak terjadi kurang bayar

Lanjutan

No	Uraian	Kondisi saat ini	Kondisi ideal
		- Melaporkan PPN kepada KPP sebelum akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir - Sesuai dengan PMK 37/PMK.03/2015	
3.	Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik saat ditunjuk sebagai Wajib Pungut	- Segala pungutan dipungut oleh PT Petrokimia Gresik - Ketidak siapan PT Petrokimia Gresik menangani resiko keuangan dan resiko administrasi	- Siap untuk menghadapi segala resiko dengan jumlah pegawai yang mencukupi
	Cara mengatasinya	- PT Petrokimia Gresik bekerja sama dengan pihak Bank BNI - Melakukan seleksi dalam pemilihan vendor atau rekanan - Melakukan kontroling terhadap masuknya Faktur Pajak	- Kondisi ini telah sesuai karena PT Petrokimia Gresik dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi terkait penunjukannya sebagai Wajib Pungut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Petrokimia Gresik peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Petrokimia Gresik yang memiliki status sebagai PKP, mulai bulan April 2015 status yang dimilikinya menjadi PKP serta Badan Usaha yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015. Sejak saat itulah PT Petrokimia Gresik melakukan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pungut atau Pemungut PPN dan/atau PPnBM yang dikenakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan. Perlakuan PPN dan/atau PPnBM saat menjadi Pemungut tidak jauh berbeda dengan perlakuan saat menjadi PKP, saat PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai Pemungut kewajiban perpajakannya menjadi bertambah, diantaranya :
 - a. Setiap Faktur Pajak yang diterima atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh rekanan, PT Petrokimia Gresik wajib memisahkan Faktur Pajak sesuai dengan nominalnya, apabila nominal Faktur Pajak tersebut kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000 tidak dilakukan Wajib Pungut, serta apabila nominal Faktur Pajak lebih dari Rp 10.000.000 PT Petrokimia Gresik Wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

- b. Faktur Pajak dengan nilai nominal Faktur kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000 menggunakan kode Faktur 010, sedangkan Faktur Pajak yang memiliki nilai nominal melebihi dari Rp 10.000.000 menggunakan kode Faktur 030.
 - c. Setiap akhir bulan PT Petrokimia Gresik melakukan pelaporan PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1111 yang berisi tentang jumlah PPN yang masih harus dibayar serta menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT untuk PPN yang dipungut atas pemenuhan kewajiban sebagai Wajib Pungut.
2. PT Petrokimia Gresik melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya berkaitan dengan penyetoran serta pelaporan PPN dan/atau PPnBM sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015. Pada tahun 2015 PT Petrokimia Gresik tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan maupun penyetoran PPN dan/atau PPnBM, karena PT Petrokimia Gresik memiliki siasat yaitu dengan memberikan tanggal batas akhir untuk rekanan menyerahkan Faktur Pajak, tanggal batas akhir tersebut adalah tanggal 5 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
3. Hambatan-hambatan yang muncul saat awal penunjukan PT Petrokimia Gresik sebagai Wajib Pungut PPn dan/atau PPnBM adalah semakin bertambahnya resiko keuangan dan administrasi yang dihadapi apabila terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN dan/atau PPnBM yang terhutang. Untuk

menghindari resiko yang terjadi, PT Petrokimia Gresik memiliki cara yaitu dengan melakukan seleksi untuk memilih dan bekerja sama dengan vendor atau rekanan, melakukan kontroling terhadap masuknya Faktur Pajak, melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) yaitu Bank BNI.

B. Saran

Saran yang diusulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. PT Petrokimia Gresik harus lebih berhati-hati terkait dengan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) agar tidak terjadi Kurang Bayar yang mengakibatkan pembetulan SPT Masa PPN dan agar tidak terkena sanksi administrasi sebesar 2% perbulan sesuai dengan pasal 8 ayat 2a (dua a) UU Nomor 16 Tahun 2009.
2. Lebih direncanakan lagi dalam penulisan SPT Masa PPN agar tidak terjadi Lebih Bayar yang dapat mengakibatkan pengkoreksian oleh Fiskus.
3. Kurangnya pembahasan atau ulasan mengenai PMK Nomor 37/PMK.03/2015 yang mengakibatkan peneliti hanya melihat dari satu sisi yaitu Badan Usaha yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*.

Jakarta: Salemba Empat

Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk*

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Lubis, Irwansyah dan Rayendra L. Toruan. 2010. *Menggali Potensi Pajak*

Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: Elex Media

Komputindo

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi Offset

Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya

Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-*

Undang. Yogyakarta: Andi Offset

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta:

Erlangga

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

_____. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 2 Edisi 6. Jakarta selatan:
Salemba Empat

- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rusjdi, Muhammad. 2005. *PPN & PPnBM*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*, Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat
 _____ 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
 _____ 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Pustakabarupres
- Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
 _____ 2014. *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Tiga. Jakarta: PT Indeks
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit UII Press
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sebelas Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/Pmk.03/2015 Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungut, Penyetoran, Dan Pelaporannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/Pmk.011/2013 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Web:

www.bps.go.id (Tanggal 21 oktober pukul 18.00 WIB)

<http://ortax.org/ortax/> (Tanggal 2 Desember 2015 pukul 12.05 WIB)

<http://datapajak.com/2014/12/15/> (Tanggal 3 Desember pukul 11.35 WIB)

www.pajak.go.id (Tanggal 17 Desember pukul 16.00 WIB)

www.BUMN.go.id (Tanggal 21 April pukul 13.12 WIB)

www.pupuk-indonesia.com (Tanggal 21 April pukul 13.17 WIB)

